

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)  
Pada Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama : MUHAMMAD SYAHPUTRA RIZKI  
NPM : 1905170345  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : MUHAMMAD SYAHPUTRA RIZKI  
NPM : 1905170345  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah  
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Dr. Eka Nurmalasari, SE., Ak. M.Si. CA)

Penguji II

(Riva Ubar Harahap S.E., Ak., M.Si., CA., CPA)

**Pembimbing**

  
(Novien Rialdy, SE., MM)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Unggul | *Cerdas* | Terpercaya

  
(Dr. H. Jaqueli, S.E., MM., M.Si.)  
Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

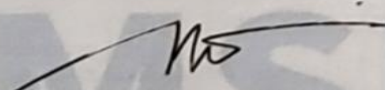
Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Muhammad Syahputra Rizki  
N P M : 1905170345  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan akuntansi pemerintahan dan Pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

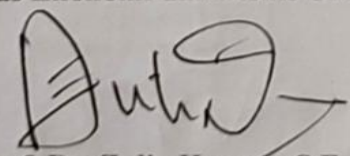
Medan, **Maret 2023**

Pembimbing Skripsi

  
(Novien Rialdy, SE., MM)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(Dr. P. Januri, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Muhammad Syahputra Rizki  
Npm : 1905170345  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Penulisan dalam Bahasa asing dibuat italic. - Singkatan dibuat lebih jelas lagi kepajangan dari singkatan tersebut - Rumusan masalah.	16/Januari/2023	
Bab 2	- Kerangka koseptual, kajian Pustaka - Hipotesis penelitian, penulisan tabel	19/Januari/2023	
Bab 3	- Kutipan harus ada di daftar Pustaka - Alamat penelitian, waktu penelitian - Uji deskriptif dijelaskan lagi	23/Januari/2023	
Bab 4	- Berialasandan penjelasan disetiap analisis dan di hasil uji - Pembahasan diperjelas lagi dengan penelitian terdahulu	23/Februari/2023	
Bab 5	- Kesimpulan dan saran ditambahkan lagi dan sempurnakan	27/Februari/2023	
Daftar Pustaka	- Gunakan Mendeley - Kutipan minimal 5 dosen Feb UMSU - Kutipan tidak pakai gelar /titel	26/Januari/2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Acc Sidang Meja Hijau	28/Februari/2023	

Medan, Maret 2023

Disetujui Oleh :

Diketahui Oleh :  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

(Asco. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

(Novien Rialdy, SE., MM)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : MUHAMMAD SYAHPUTRA RIZKI

NPM : 1905170345

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

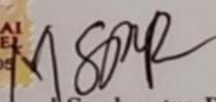
Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”** adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan,



  
Muhammad Syahputra Rizki

## ABSTRAK

### **PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**Muhammad Syahputra Rizki**

Program Studi Akuntansi

Email: [muhammadsyahputrarizki29@gmail.com](mailto:muhammadsyahputrarizki29@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan akuntansi pemerintahan dan Pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif deskriptif dan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Badan Keuangan dan Aset daerah dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner yang berbentuk Gform. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 29.0.

Hasil ini menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kantor badan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara hal ini dikarenakan nilai t-hitung yang lebih tinggi dari t-tabel, Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di kantor badan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara hal ini dikarenakan nilai thitung yang lebih tinggi dari t-tabel dan Penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di Kantor badan keuangan dan aset daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara terlihat dari nilai f-hitung yang lebih tinggi dari f-tabel.

**Kata Kunci:** Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **ABSTRACT**

### **THE INFLUENCE OF GOVERNMENT ACCOUNTING AND SUPERVISION OF THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS ON THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF NORTH SUMATRA PROVINCIAL GOVERNMENT AGENCIES IN FINANCIAL AND ASSET AGENCIES AREA**

**Muhammad Syahputra Rizki**

Accounting Study Program

Email: [muhammadsyahputrarizki29@gmail.com](mailto:muhammadsyahputrarizki29@gmail.com)

*This study aims to determine the effect of implementing government accounting and monitoring the quality of financial reports on performance accountability of North Sumatra provincial government agencies in regional financial and asset bodies and to determine the effect partially or simultaneously on the regional financial and asset offices of North Sumatra province. The approach used in this research is a descriptive and associative quantitative approach. The population in this study are all Regional Financial and Asset Agency Work Units within the scope of the North Sumatra Provincial Government. The data collection technique in this study used a questionnaire technique in the form of a Gform. Data processing in this study used the SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) software version 29.0.*

*These results indicate that the application of government accounting has a significant effect on the accountability of Government Agency Performance in the regional financial and asset agency offices of North Sumatra Province. the performance of government agencies in the regional financial and asset agency offices of North Sumatra Province, this is due to the higher  $t$ -count value than  $t$ -table and the application of government accounting and monitoring the quality of financial reports affects the performance accountability of government agencies in the offices of financial and asset bodies of North Sumatra Province as seen from the  $f$ -count value which is higher than the  $f$ -table.*

**Keywords:** *Implementation of Government Accounting, Quality Control of Financial Statements, Performance Accountability of Government Agencies.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerahNya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pengaruh Penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah”*** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus Kepada Almarhum Ayahanda **Muhammad Sahar** dan Ibunda **Rismawati** tercinta yang saya sayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian yang luar biasa. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani M,AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri S.E., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap S.E., Ak., M.Si., CA., CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Novien Rialdy, SE., MM** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Proposal ini dapat diselesaikan.
8. Bapak **Sukma Lesmana, S.E.,M.Si** selaku Dosen Penasehat Akademik.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Sahabatku **Musa Dzul Akbar** selalu memberikan dukungan dan motivasi selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan sebaik-baiknya.
11. Buat seluruh Keluarga dan teman yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan serta kesalahan dari materi ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Medan,    Maret 2023

**MUHAMMAD SYAHPUTRA RIZKI**  
**1905170345**

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan teori .....	12
2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	12
2.1.2 Akuntansi Pemerintahan.....	14
2.1.3 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan.....	19
2.1.4 Penelitian Terdahulu.....	23
2.2 Kerangka Konseptual .....	25
2.2.1 Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	25
2.2.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.....	26
2.2.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	26

2.2.4 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buton.....	27
2.3 Hipotesis Penelitian .....	28
<b>BAB III.....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.1.1 Desain Penelitian .....	30
3.2 Definisi Operasional.....	30
3.2.1 Variabel Independen.....	30
3.2.2 Variabel Dependen .....	31
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	33
3.3.1 Tempat Penelitian .....	33
3.3.2 Waktu Penelitian.....	33
3.4 Teknik Pengambilan Sempel (Populasi dan Sampel Penelitian).....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Pengujian Instrumen.....	35
3.6.1 Uji Validitas.....	36
3.6.2 Uji Reliabilitas .....	36
3.7 Teknis Analisis Data.....	37
3.7.1 ..... Uji Statistik Deskriptif .....	38
3.7.2 ..... Uji Hipotesis .....	39
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.2 Karakteristik Responden.....	45
4.1.3 Analisis Persentase Jawaban Responden.....	47
4.2 Pengujian Instrumen .....	53
4.2.1 Hasil Uji Validitas .....	53
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	54
4.3 Analisis Data .....	55
4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	55
4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	57
4.3.3 Hasil Uji Asumsi Regresi Linear Berganda.....	61
4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	63
4.4 Pembahasan .....	66

4.4.1 Penerpan Akuntansi Pemerintahan Terhadap kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	66
4.4.2 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	67
4.4.3 Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	68
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Sumatera Utara Sumber IHPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 .....	4
Tabel 1.1. Penelitian terdahulu.....	24
Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Skedul Rencana Penelitian.....	33
Tabel 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	34
Tabel 3.4 Skala Likert .....	35
Tabel 4.1 Data Jumlah Responden BKAD PROVSU .....	45
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	46
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	46
Tabel 4.5 Kriteria Jawaban Responden.....	47
Tabel 4.6 Persentase Jawaban Variabel Penerapan Akuntansi Pemerintahan .....	47
Tabel 4.7 Persentase Jawaban Variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan .....	49
Tabel 4.8 Persentase Jawaban Variabel Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah .....	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas .....	54
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.12 Hasil Uji Kolmogorov-smirnov .....	57
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi .....	61
Tabel 4.15 Hasil Uji Coefficients (Hasil Regresi Linier Berganda) .....	62
Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik t (Parsial) .....	63
Tabel 4.17 ANOVA (Hasil Uji Statistik f (Simultan)) .....	64
Tabel 4.18 Model Summary (Hasil Uji Statistik R2 (Determinasi)) .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	28
Gambar 4.1 Histogram Hasil Uji Normalitas.....	58
Gambar 4.2 Grafik P-Plot Hasil Uji Normalitas .....	58
Gambar 4.3 Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas.....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian dan jawaban responden .....	75
Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	82
Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	83
Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	83
Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Regresi Linear Berganda .....	85
Lampiran 6. Hasil Pengujian Hipotesis .....	85
Lampiran 7. Nilai Tabel Durbin Watson.....	86
Lampiran 8. Nilai Tabel T .....	86
Lampiran 9. Kurva Uji T.....	87
Lampiran 10. Nilai Tabel F.....	87
Lampiran 11. Surat Permohonan Pengajuan Judul .....	88
Lampiran 12. SK. Pembimbing Skripsi .....	89
Lampiran 13. Surat Persetujuan Judul Skripsi .....	90
Lampiran 14. Surat Permohonan Izin Riset .....	91
Lampiran 15. Surat Izin Riset .....	92
Lampiran 16. Surat Izin Riset Perusahaan .....	93
Lampiran 17. Berita Acara Bimbingan Proposal .....	94
Lampiran 18. Berita Acara Seminar Proposal.....	95
Lampiran 19. Lembar Pengesahan Proposal.....	96
Lampiran 20. Surat Selesai Riset .....	97
Lampiran 21. Surat Selesai Riset Perusahaan .....	98
Lampiran 22. Surat Keterangan Perpustakaan .....	99
Lampiran 23. Surat Permohonan Ujian Skripsi .....	100
Lampiran 24 Surat Pernyataan .....	101
Lampiran 25. Daftar Riwayat Hidup .....	102

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggung jawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang akuntabilitas pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian akuntabilitas yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah.

faktor sistem yang mempengaruhi akuntabilitas seperti standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan. Kebijakan reformasi keuangan negara atau daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah di Indonesia mulai dilaksanakan seiring dengan berlakunya aturan mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (2010). Prinsip yang harus dilaksanakan adalah tata kelola keuangan



yaitu penyajian laporan keuangan yang baik. Agar terwujudkan *good governance* instansi pemerintah perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah sehingga akan meminimalisir praktik korupsi, *kolusi* dan *nepotisme*. (Hafsah., dkk, 2014).

Meskipun lembaga pemerintahan bukanlah organisasi yang memiliki tujuan menghasilkan laba, tetapi dalam aktivitasnya lembaga pemerintahan ternyata melakukan transaksi pengeluaran dan menerima pendapatan, maka dari itu lembaga pemerintahan juga memerlukan akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terbitnya PP ini sekaligus juga membuka sejarah baru dalam pengelolaan keuangan negara, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki SAP.

Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga publik yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya transparansi dan pemberian kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. (Fitriani Saragih. 2018).

Standar Akuntansi Pemerintah atau yang dikenal dengan SAP diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP juga telah ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan supaya entitas pemerintah ketika menyusun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan LKPD (Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi (Eka Nurmala Sari. 2016)

Tujuan dari pengawasan intern adalah untuk melindungi harta kekayaan (asset) suatu badan (organisasi), dapat dipercayanya catatan keuangan, meningkatkan efisiensi kerja dan dapat mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya suatu pengawasan yang baik, hendaknya struktur organisasi dapat memisahkan fungsi-fungsi operasional penyimpanan dan pencatatan (Zulia Hanum. 2009).

Laporan keuangan merupakan alat yang paling penting untuk memperoleh informasi tentang posisi keuangan dari hasil yang dicapai organisasi. Menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan organisasi adalah salah satu cara untuk memperoleh informasi tersebut. Laporan keuangan juga dapat menunjukkan apakah organisasi mengalami kemajuan atau sebaliknya (Novien Rialdy. 2018).

Berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (LKPD) tahun 2020/2021 yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada wilayah Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa 24 entitas memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 10 entitas memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Perkembangan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2021 dan Terhadap pemberian opini WDP pada 10 entitas di

wilayah Provinsi Sumatera Utara, BPK menemukan permasalahan yang bernilai dampak material sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan, dengan rincian tertulis di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

- b. berdasarkan Temuan-temuan signifikan terkait kelemahan sistem perikasaan inten (SPI) dan/atau Ketidak patuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diklasifikasikan sesuai dengan siklus dalam laporan keuangan, disajikan pada Tabel berikut;

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah**  
**Provinsi Sumatera Utara (Sumber IHPD Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2021**

Permasalahan	Jumlah Pemda	Keterangan (Kabupaten/Kota)
<b>A. Penyusunan Laporan Keuangan</b>		
1. Klasifikasi Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Keuangan Lainnya pada sejumlah OPD Tidak Tepat	17	Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Nias, Padang Lawas, Papak Bharat, Samosir, Sedang Bedagai, Simalungu, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Binjai, Medan, Padang Sidempuan, Humbang Hasundutan
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tidak Disepakati oleh DPRD	1	Humbang Hasundutan
<b>B. Pendapatan</b>		
1. Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib	8	Deli Serdang, Langkat, Nias Barat, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Medan
2. Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Optimal dan Tidak Sesuai Ketentuan	13	Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Tengah, Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Tebing Tinggi
3. Pengelolaan Pendapatan Tidak Sesuai Ketentuan	2	Tapanuli Tengah, Sibolga
<b>C. Belanja</b>		
1. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	22	Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Batubara, Dairi, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Gunungsitoli, Padang Sidempuan, Sibolga, Tebing Tinggi

2. Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak	6	Asahan, Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan
3. Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal	34	Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Binjai, Gunungsitoli, Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi
4. Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa	9	Deli Serdang, Karo, Labuhanbatu Utara, Nias, Simalungun, Tapanuli Tengah, Medan, Padang Sidempuan, Tebing Tinggi
5. Kelebihan Pembayaran tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan	1	Dairi
6. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14	Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Medan, Sibolga
7. Pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum Memadai	13	Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Karo, Langkat, Nias Barat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Tebing Tinggi
8. Kelebihan Perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah	1	Karo
9. Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Reses DPRD	2	Labuhanbatu, Binjai
10. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai Ketentuan	10	Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Labuhanbatu, Nias Barat, Nias, Nias Utara, Padang Lawas, Gunungsitoli, Sibolga, Tebing Tinggi
11. Kelebihan Pembayaran belanja tidak terduga (BTT), Uang Lelah Petugas Posko gugusan percepatan penanganan (GTPP), Honorarium Penanganan Covid-19	11	Provinsi Sumatera Utara, Dairi, Karo, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan, Sibolga, Tebing Tinggi
<b>D. Pembiayaan</b>		
1. Perencanaan dan Pengawasan Investasi dalam Bentuk Penyertaan Modal kepada PT BNC Belum Memadai	1	Nias Selatan
2. Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut dan PDAM Mual Nauli Tidak Sesuai Ketentuan	1	Tapanuli Tengah
3. Investasi Jangka Panjang Permanen pada PD Sibolga Nauli Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	Sibolga
<b>E. Aset</b>		
1. Penatausahaan Persediaan Belum Tertib	19	Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Binjai, Medan,

		Padang Sidempuan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi
2. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib	31	Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Binjai, Gunungsitoli, Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi
3. Pengelolaan Kas Belum Tertib	13	Asahan, Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Nias, Nias Utara, Samosir, Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padang Sidempuan, Tanjungbalai
4. Pengelolaan Piutang Belum Memadai	8	Mandailing Natal, Nias Barat, Nias, Nias Utara, Simalungun, Tapanuli Tengah, Medan, Tanjungbalai
F. Kewajiban		
1. Penatausahaan Kewajiban Belum Memadai	4	Deli Serdang, Labuhan Batu, Nias Barat, Tanjungbalai

Berdasarkan permasalahan di LKPD, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kesesuaian penganggaran Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Bantuan Sosial dengan klasifikasinya serta meningkatkan kecermatan dalam menyusun anggaran.
- b. Kepala badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) melakukan evaluasi atas pengelolaan pajak daerah.
- c. Kepala OPD terkait melakukan evaluasi atas pengelolaan retribusi daerah.
- d. Kepala OPD terkait melakukan evaluasi atas pengelolaan pendapatan daerah.
- e. Kepala OPD terkait memproses kelebihan bayar perjalanan dinas dan menyetorkan ke kas daerah.

- f. Kepala OPD terkait melakukan pengendalian dan pengawasan atas belanja bahan bakar minyak (BBM).
- g. Kepala OPD melakukan evaluasi atas kesesuaian pertanggungjawaban belanja modal dengan pekerjaan fisik, pengenaan denda atas pekerjaan yang terlambat diselesaikan, dan penyusunan *contract change order* (CCO) atas pekerjaan yang berubah, serta memproses pengembalian kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah atas kekurangan volume.
- h. Kepala OPD terkait untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian pertanggungjawaban belanja barang dan jasa dengan realisasi fisiknya dan memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah.
- i. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran OPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran TKI dan tunjangan perumahan dan menyetorkan ke kas daerah.
- j. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran OPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan menyetorkan ke kas daerah.
- k. Kepala sekolah dan Bendahara BOS mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah/negara dan mematuhi juknis pengelolaan dana BOS.
- l. Kepala OPD terkait untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas perhitungan iuran jaminan kesehatan daerah.
- m. Kepala OPD terkait untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas belanja reses.

- n. Pelaksana pengelolaan keuangan daerah (PPKD) lebih optimal dalam menagih laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari penerima.
- o. Kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang di lapangan.
- p. PPKD selaku badan usaha daerah (BUD) sebagai Pengelola dan Pengawas Investasi Pemerintah Daerah lebih optimal dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan investasi pemerintah daerah.
- q. Kepala OPD terkait melakukan stock opname per 31 Desember.
- r. Kepala BPKAD, Kepala OPD dan Pengurus Barang untuk melengkapi informasi pada Kawasan industry berat (KIB), melakukan penilaian item jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya bernilai Rp0,00, dan menyelesaikan inventarisasi BMD.
- s. Kepala OPD terkait untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan kas.
- t. Kepala BPKAD sebagai pejabat penatausahaan piutang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian piutang.
- u. Kepala BPKAD selaku BUD dan Kepala OPD terkait lebih optimal dalam menyelesaikan pertanggungjawaban pembayaran utang.).

Fenomena yang terjadi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menata dan mengelola transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masih

adanya kekurangan sehingga mereka masih mengharapkan tanggapan, masukan, serta saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan LKDP yang akuntabel.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah. Seperti penelitian Erlina Intan Fedrianawati (2016) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo secara parsial variabel pengawasan laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan variabel penerapan laporan akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan membuat skripsi yang berjudul: **"Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah"**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu:

1. Adanya ketidak sesuaian dalam laporan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Adanya kesalahan dalam pengawasan laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.



3. Adanya kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang mengakibatkan laporan tidak sesuai dengan ketentuan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Setelah melihat uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah?
2. Apakah ada pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah?
3. Apakah ada pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- b. Manfaat Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pihak Insitusi/instansi pemerintahan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi instansi dan memperbaiki kendala yang ada dalam menyelesaikan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan instansi secara optimal.

- c. Bagi Pembaca dan Penelitian selanjutnya

Penelitian dapat menjadi salah satu referensi sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi sektor publik dan dan kajian tentang pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan teori**

Pada penelitian pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah ini dilandaskan oleh teori-teori yang dikutip dari jurnal, buku, ahli akuntansi, maupun penelitian-penelitian terdahulu. Setiap teori yang diambil tercantum nama pengarang, tahun buku dan halaman buku.

##### **2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: (a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). (Institut Pertanian Bogor, 2019).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (2010) dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

#### **2.1.1.2 Prinsip-Prinsip, Tujuan dan Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap sebagai berikut:( a.Penetapan rencana stratejik; b.Pengukuran kinerja; c.Pelaporan kinerja; d.Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara kesinambunga).

## **2.1.2 Akuntansi Pemerintahan**

### **2.1.2.1 Sejarah Akuntansi Pemerintah**

Pada tahun 1945, proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara mengacu sepenuhnya pada *Indische Comptabiliteitswet (ICW)* yang merupakan produk Pemerintah Kolonial Belanda. Masa Ini berlangsung mulai dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1967.

Pada tahun 1967, untuk pertama kalinya, pemerintah menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara yang disahkan melalui undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1967. Dengan adanya undang-undang ini, pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara telah memenuhi ketentuan dalam regulasi keuangan negara saat itu, seperti telah melalui pemeriksaan auditor ataupun telah dibahas bersama dewan legislatif untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang. Keputusan menteri Keuangan nomor KMK-476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang merupakan sistem akuntansi pertama yang digunakan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Implementasi dari peraturan ini merupakan sebuah transisi sebelum pemberlakuan sistem akuntansi pemerintah secara penuh. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Berbasis Akrua). Ruang lingkup dari PP Nomor 71 tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrua dan SAP berbasis kas menuju akrua. (Monevkeu, 2019)

### **2.1.2.2 Definisi Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan memiliki pengertian yang beragam dikarenakan dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, akuntansi pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu. Ada banyak ruang lingkup yang digarap di dalam pencatatan pembukuan jenis ini, salah satunya ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah. Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143), akuntansi pemerintahan adalah jasa pembuatan informasi mengenai keuangan negara dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi negara.

Menurut Kustadi Arinta (1996) Akuntansi pemerintahan merupakan beberapa sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan Negara (*public finance*), dan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika atau yang lebih permanen pada seluruh tingkatan dan unit pemerintahan. Sedangkan Menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghazali (2001) Akuntansi pemerintahan adalah berbagai data akuntansi yang digunakan untuk memberi suatu informasi tentang seluruh transaksi ekonomi serta keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi – organisasi dengan tujuan *non-profit* atau tidak menghasilkan laba

### **2.1.2.3 Peran Akuntansi Pemerintah**

Adapun peran dari akuntansi pemerintah ini diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas ini kemudian Mempertanggung jawabkan megnesia pengelolaan sumber daya dan juga pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk bisa sampai pada tujuan yang telah atau sudah ditetapkan dengan secara periodik.

- b. Manajemen Membantu para nasabah untuk kemudian mengevaluasi pelaksanaan kegiatan atau aktivitas suatu entitas pelaporan di dalam periode pelaporan sehingga bisa atau dapat memudahkan di dalam fungsi perencanaan, pengelolaan serta juga pengendalian atas seluruh aktifa, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak.
- c. Transparansi, ini kemudian Memberikan suatu informasi keuangan yang terbuka serta jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai atau memiliki hak untuk dapat atau bisa mengetahui dengan secara terbuka serta menyeluruh atas suatu pertanggungjawaban dari pemerintah di dalam pengelolaan sumber daya yang sudah atau telah dipercayakan kepadanya serta juga ketaatannya diperaturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*) ini kemudian Membantu para nasabah untuk bisa atau dapat mengetahui kecukupan di dalam penerimaan pemerintah di periode pelaporan guna bisa atau dapat membiayai semua atau seluruh pengeluaran yang dialokasikan serta juga apakah generasi yang akan datang tersebut diasumsikan akan ikut didalam menanggung beban pengeluaran tersebut.



#### **2.1.2.4 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan tersebut tentu memiliki karakteristik khusus, apabila dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Dibawah ini merupakan ciri atau karakteristik akuntansi pemerintahan diantaranya:

- a. Pemerintah itu mencatat anggaran pada saat anggaran dibukukan.
- b. Pemerintah tersebut tak berorientasi pada keuntungan hingga di dalam akuntansi pemerintahan tersebut kemudian tak ada laporan laba dan juga treatment akuntansi yang berkaitan ata berhubungan dengannya.
- c. Sangat mungkin memakai dana itu lebih dari satu.
- d. Sifatnya kaku disebabkan karna tergantung pada perundang-undangan.
- e. Membukukan pengeluaran modal.
- f. Tidak memerlukan perkiraan modal dan juga laba yang ditahan dalam neraca.

#### **2.1.2.5 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan ini kemudian tidak hanya berisi mengenai penjelasan yang diberikan pemerintah nasional namun diberikan juga oleh PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa ) (*A Manual Government Accounting*) yang bisa atau dapat diringkas diantaranya sebagai berikut (dalam Bachtiar Arif dkk, 2002:9):

- a. Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU serta Peraturan lain. Akuntansi Pemerintah tersebut kemudian dirancang untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UUD, UU serta Peraturan lain.

- b. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut harus dikembangkan sesuai yakni dengan klasifikasi anggaran yang telah atau sudah disetujui pemerintah serta lembaga legeslatif.
- c. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan. Sistem Akuntansi Pemerintah tersebut kemudian harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk dapat mencatat transaksi-transaksi yang terjadi
- d. Memudahkan pemeriksaan oleh aparat pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah yang dikembangkan tersebut kemudian harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.
- e. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan. Dengan adanya perubahan lingkungan serta juga sifat transaksi, sistem Akuntansi Pemerintah tersebut harus terus disesuaikan serta juga dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan juga relevansi.
- f. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Sistem Akuntansi Pemerintah tersebut kemudian harus mengembangkan perkiraan-perkiraan dengan secara efektif sehubungan yakni dengan sifat serta perubahan lingkungan sehingga kemudian bisa atau dapat mengungkapkan hasil ekonomi serta keuangan dari pelaksanaan di suatu program. Pengadaan suatu Perkiraan yang kemudian dibuat tersebut harus memungkinkan adanya analisis ekonomi atas data keuangan.

### **2.1.3 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan**

#### **2.1.3.1 Definisi Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan**

Pengawasan merupakan hal penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. Pengawasan

merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan (Kadarman 2001).

Laporan keuangan kadang menjadi permasalahan dalam beberapa rumah sakit yang menjadi perhatian khusus dan perlu ditangani secara serius karena baik buruknya laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan tersebut.

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan indikator dan diuji dengan 4 (empat) pernyataan mengenai dapat dipahami, relevan informasi, keandalan dan dapat dibandingkan. Satuan pengukuran yang digunakan adalah skala *Semantic Defferensial* (Sugiyono, 2013).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012), laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk kepentingan umum dalam penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini,

### **2.1.3.2 Tujuan dan Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Arens, et al (2017) menyebutkan bahwa tujuan penerapan pengawasan adalah tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan

pengawasan intern yang meliputi menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, serta menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu hipotesis.

Menurut Khaula Senastri, (2021) Karakteristik laporan keuangan:

(a.Dibuat untuk menyediakan informasi yang bermanfaat guna mengevaluasi performa manajerial dan juga organisasional; b.Pelaporan keuangan akan mampu membantu memenuhi kewajiban perusahaan agar semakin akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga akan membantu memenuhi keperluan para pengguna laporan keuangan yang memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan; c. Keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi dan oleh karena itu para pemilik kepentingan laporan keuangan menyandarkan laporan keuangan sebagai suatu sumber informasi yang sangat penting; d.Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.).

### **2.1.3.3 Indikator dan Tujuan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan**

Pengawasan Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator (Darwanis, Saputra dkk, 2016) antara lain:

- a. Relevan, Laporan keuangan dikatakan relevan apabila memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yakni informasi dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya dan memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*), yakni informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- b. Ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu penyajian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan aspek penting untuk memperoleh keunggulan dalam pengambilan keputusan.
- c. Kelengkapan informasi yang disajikan, yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi utama termuat dengan jelas agar mencegah kekeliruan dalam penggunaan informasi.
- d. Penyajian secara jujur, yaitu informasi akuntansi pemerintah harus disajikan secara jujur, yaitu menggambarkan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Semakin jujur dalam penyajian laporan keuangan, maka akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
- e. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh
- f. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain.
- g. Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengguna laporan keuangan.

Menurut Novdin M. Sianturi dan Djahotman Purba dalam buku Analisis Tujuan utama pengawasan laporan keuangan dilakukan. Tujuan tersebut adalah:

- a. Untuk penyaringan (*screening*) Analisis laporan keuangan ditujukan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang. Contoh aktivitasnya seperti merger, inventasi, atau lainnya.
- b. Untuk peramalan (*forecasting*) Analisis laporan keuangan ditujukan untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa depan akan seperti apa. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, apakah untung atau rugi.
- c. Untuk diagnosa (*dianogsis*) Analisis laporan keuangan ditujukan untuk melihat kemungkinan terjadinya masalah dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan. Sehingga perusahaan atau pihak yang berkepentingan bisa membuat strategi untuk mencegah permasalahan itu terjadi.
- d. Untuk penilaian (*evaluation*) Analisis laporan keuangan ditujukan untuk mengetahui dan menilai prestasi manajemen, keuangan, operasi, dan lainnya. Penilaian ini juga ditujukan untuk melihat kinerja karyawan dan melakukan perbaikan atas hal yang dirasa kurang.

#### **2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil dari Penelitian
1.	(Pratiwi, 2013)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penelitian ini Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Penerapan akuntansi sektor publik memiliki hubungan erat yang kuat terhadap, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diterapkannya akuntansi sektor publik maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan.
2.	(Wina & Khairul, 2014)	Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan, keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, jika standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawsan kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan maka akan menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik.
3.	(Erlina Intan Fedrianawati, 2017)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan secara simultan penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4.	(Arjuna & Annie Mustika Putri, 2019)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukan nilai variabel gaya kepemimpinan memiliki signifikansi sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa H4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan maka semakin baik akuntabilitas. Gaya kepemimpinan yang efektif menekankan peran pemimpin dalam mengatur pegawai atau bawahan agar bekerja semaksimal mungkin guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5.	(Nining Asniar Ridzal, 2020)	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah	Hasil Penelitian ini menunjukan menunjukan spenelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang berkualitas mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi dan merupakan syarat terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik. No. 71 Tahun 2010

		(BPKAD) Kabupaten Buton	laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi unsur-unsur relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan daerah akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika laporan keuangan tersebut mendapatkan opini selain WTP maka dapat dikatakan kualitas dari laporan keuangan masih belum maksimal dikarenakan belum menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan baik dan benar. Jika standar akuntansi pemerintahan diterapkan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah..
--	--	-------------------------	---

## 2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari teori diatas yang hasilnya semua berpengaruh dan didukung oleh peneliti terdahulu, maka disimpulkan kerangka berfikir konseptual sebagai berikut:

### 2.2.1 Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik dan pemaparan laporan keuangan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintah. Hasil dari penelitian Wina & Khairani (2014) menunjukkan bahwa kedua variabel secara simultan berpengaruh positif. Semakin tinggi pengaruh standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan maka akan meningkatkan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik pula.

Dengan kata lain, apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu



dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara independensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar pemerintahan yang berlaku. (Wina & Khairani, 2014).

### **2.2.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo**

Perbaikan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Hasil dari penelitian (Fedrianawati,2016) menunjukkan bahwa secara parsial penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Sedangkan secara simultan penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **2.2.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

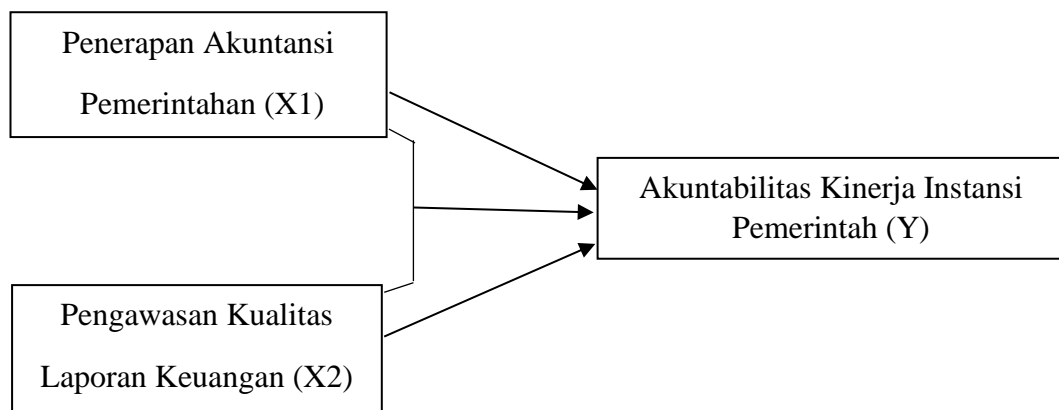
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Hasil

dari penelitian (Pratiwi, 2013) Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Penerapan akuntansi sektor publik memiliki hubungan erat yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diterapkannya akuntansi sektor publik maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **2.2.4 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buton**

Adanya Peraturan Pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah guna menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil Penelitian dari (Nining Asniar Ridzal, 2020) menunjukan penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang berkualitas mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi dan merupakan syarat terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik. No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi unsur-unsur relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan daerah akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jika standar akuntansi pemerintahan diterapkan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dari penjelasan diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebahai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari kerangka konseptual di atas, sesuai dengan tujuan dan masalah yang dikemukakan, maka pengajuan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BKAD Provsu.
- H2 : Terdapat pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BKAD Provsu.
- H3 : Terdapat pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BKAD Provsu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintahan. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh antara kedua variabel tersebut maka penulis menggunakan metode asosiatif kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat, jadi disini terdapat variabel yang mempengaruhi (variabel dependen) dan variabel yang dipengaruhi (variabel independen) (Sugiyono, 2016).

### **3.1.1 Desain Penelitian**

Menurut Husein.Umar (2007, hal. 6). “desain penelitian dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset.” Jadi desain yang di gunakan penulis yaitu melakukan Survei ke kantor BKAD Provinsi Sumatera Utara.

### **3.2 Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variable independen.

Diuraikan definisi dari kedua variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab, karena adanya variabel yang dipengaruhi. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel yang mempengaruhi. Berikut ini yang menjadi variabel dependen dan independent dalam penelitian ini:

#### **3.2.1 Variabel Independen**

##### **3.2.1.1 Penerapan Akuntansi Pemerintahan (X1)**

Akuntansi pemerintahan ini kemudian tidak hanya berisi mengenai penjelasan yang diberikan pemerintah nasional namun diberikan juga oleh PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa ) (A Manual Government Accounting) yang bisa atau dapat diringkas diantaranya sebagai berikut (dalam Bachtiar Arif dkk, 2002:9): ( a. Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU serta Peraturan lain; b. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran; c. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah dan Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan secara efektif ).

### **3.2.1.2 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)**

Menurut Arens, et al (2017) menyebutkan bahwa tujuan penerapan pengawasan adalah tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan pengawasan intern yang meliputi menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, serta menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu hipotesis. Menurut (Khaula Senastri 2021) menyebutkan beberapa indikator laporan keuangan adalah sebagai berikut ini: (a. Relevan; b. Ketepatan waktu pelaporan keuangan; c. Kelengkapan informasi yang disajikan; d. Penyajian secara jujur; e. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi; f. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan;g. Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikanInformasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas).

### **3.2.2 Variabel Dependen**

#### **3.2.2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (2010) dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

**Tabel 5.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional Penelitian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Penerapan Akuntansi pemerintah (X1)	Akuntansi pemerintahan ini kemudian tidak hanya berisi mengenai penjelasan yang diberikan pemerintah nasional namun diberikan juga oleh PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa ) ( <i>A Manual Government Accounting</i> ) yang bisa atau dapat diringkas diantaranya sebagai berikut (dalam Bachtiar Arif dkk, 2002:9).	a. Penerapan berbasis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas, penerapan berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajian secara wajar	Skala Likert
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	Pengawasan kualitas laporan keuangan merupakan suatu tindakan pengawasan yang menilai baik buruknya pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan kualitas laporan keuangan dalam suatu instansi. Arens et al (2016) menyebutkan bahwa tujuan penerapan pengawasan adalah tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan pengawasan intern yang meliputi menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, serta menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi.	a. Relevan b. Ketepatan waktu pelaporan keuangan c. Kelengkapan informasi yang disajikan d. Penyajian secara jujur e. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi f. Isi laporan keuangan dapat dibandingkanKeakuratan dan kejelasan informasi yang disajikanInformasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas	Skala Likert
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (2010) dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik tugas yang telah dibebankan kepadanya.	a. Kualitas (mutu) b. Kuantitas (jumlah) c. Ketepatan waktu d. Efektivitas Efisiensi	Skala Likert

### 3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, jalan Imam Bonjo No. 18, Madras Hulu, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Januari 2023 sampai Maret 2023, Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Skedul Rencana Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	2023											
		Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1	Pengajuan judul	■											
2	Pembuatan proposal		■	■	■	■	■	■					
3	Bimbingan Proposal				■								
4	Seminar Proposal					■	■	■					
5	Penyusunan Skripsi						■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	
7	Sidang Meja Hijau											■	

### 3.4 Teknik Pengambilan Sempel (Populasi dan Sampel Penelitian)

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah



wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari penjelasan para ahli tersebut, Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Badan Keuangan dan Aset daerah dalam lingkup Pemerintahan Provsu dengan jumlah pegawai BKAD sebanyak 37 yang terdiri atas:

**Tabel 3.3**  
**Populasi dan Sampel Penelitian**

NO	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Sub Bagian	5
5	Kepala Sub Bidang	15
6	Kelompok Jabatan Fungsional	10
Total		37

Penelitian ini menggunakan teknik sampling probabilitas (*probability*) dimana merupakan teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 37 responden, metode pemilihan sampel menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel hal tersebut dikarenakan bahwa jumlah populasi yang terlalu sedikit.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui metode angket, Menurut Sugiyono (2013:142) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada pegawai (responden) di seluruh organisasi pemerintahan. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner dengan model skala *likert* untuk menunjukkan persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan dengan skor sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Skala Likert**

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.6 Pengujian Instrumen

Menurut Sugiyono (2012), Definisi instrumen penelitian ialah alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena sosial serta alam yang sesuai dengan variabel penelitian.

Sebelum kuesioner disebarkan oleh peneliti kepada responden, maka kuesioner perlu diuji terlebih dahulu agar data yang akan dianalisis memiliki derajat ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan uji instrumen yang terdiri dari:

### 3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas adalah dengan mengkorelasi item-item total, yakni dengan mengkorelasikan skor-skor suatu sitem angket dengan totalnya.

Rumus yang digunakan dalam uji validitas yaitu rumus kolerasi *product moment* adalah sebagai berikut:

$$r^{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum Y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

- $r_{xy}$  = Item Instrument variabel dengan totalnya.
- $x$  = Jumlah butir pertanyaan
- $y$  = Skor total pertanyaan
- $n$  = Jumlah Sampel

Adapun kriteria pengujian menurut Juliandi. Azuar, dkk (2015) adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *pearson correlation* ( $R_{hitung}$ ) >  $R_{tabel}$  maka butir pertanyaan dikatakan valid.
- b. Jika nilai *pearson correlation* ( $R_{hitung}$ ) <  $R_{tabel}$  maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

### 3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Azuar, dkk (2015:80) tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat/mengukur apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Azuar, 2015:139). Menurut Sugiyono (2012, hal. 249) menggunakan teknik Cronbach Alpha dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma^2}{\sigma^2} \right)$$

Keterangan:

- r = Reliabilitas instrument
- k = Banyak butir pertanyaan
- $\sum \sigma^2$  = Jumlah varians butir
- $\sigma^2$  = Varian total

Kriteria pengujiannya:

1. jika nilai koefisien reliabilitas yakni *cronbach alpha* > 0,60 maka instrumen variabel adalah reliabel (terpercaya).
2. jika nilai *cronbach alpha* < 0,60 maka variabel tidak reliabel (tidak dipercaya).
3. Realibilitas berkaitan dengan tingkat keandalan suatu instrument penelitian.

Berdasarkan kriteria pengujiannya maka pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*, dikatakan reliabel jika hasil alpha > 0,60.

### 3.7 Teknis Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah:

### **3.7.1 Uji Statistik Deskriptif**

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Ghozali (2016, hal.19) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dan memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.

#### **3.7.1.1 Uji Asumsi Regresi Linear Berganda**

Digunakan untuk meramalkan Pengaruh Penerapan Akuntansi pemerintahan dan Pengawasan Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan menggunakan persamaan regresi yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependent (Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Besaran koefisien regresi dari masing - masing variabel

X1 = Variabel independent (Penerapan Akuntansi Pemerintahan)

X2 = Variabel independent (Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan)

$\varepsilon$  = Standart Error

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan terlebih dahulu harus

memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik regersiliner berganda sebagai berikut:

- a. Uji Normalitas, untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atautkah tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
- b. Uji Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Apabila variabel independen memiliki angka VIF di sekitar 1, dan nilai tolerance mendekati 1 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut tidak memiliki multikolinearitas dengan variabel lain.
- c. Uji Heteroskedastisitas, menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
- d. Uji Autokorelasi, menguji untuk melihat apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

### **3.7.2 Uji Hipotesis**

Menurut Juliandi et al (2015) hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis diperoleh dengan memprediksi penelitian terdahulu sebagai referensi dalam pembuktian uji hipotesis berguna untuk mengetahui apakah secara parsialmemiliki hubungan antara  $X_1$ ,  $X_2$ , berpengaruh terhadap  $Y$ . ada tiga jenis koefisien yang dapat dilakukan dengan uji t.

### 3.7.2.1 Uji Signifikan Parsial (Uji statistik t)

Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t yaitu untuk menguji apakah variabel bebas.

Tahap-tahap:

a) Bentuk pengujian

$H_0$ : tidak ada pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

$H_a$ : ada pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b) Kriteria pengambilan keputusan, Membandingkan hasil  $t_{sig}$  dengan nilai

probabilitas  $\alpha$  0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika  $t_{sig} > \alpha$  0,05 berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  Ditolak

Jika  $t_{sig} \leq \alpha$  0,05 berarti  $H_0$  ditolak. Dan  $H_a$  Diterima

Rumus yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :

$$t = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan: (t = nilai  $t_{hitung}$ ;  $r_{xy}$  = korelasi xy yang ditemukan; n = jumlah sampel)

### 3.7.2.2 Pengujian Secara Simultan (Uji statistik F)

Perlu mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji F. Uji F ini dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANNOVA) (Basuki & Prawoto, 2016).

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara Bersama sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

- a. Merumuskan hipotesis

H<sub>0</sub>: tidak ada pengaruh pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja.

H<sub>a</sub>: ada pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, pengawasan kualitas laporan keuangan, terhadap akuntabilitas kinerja.

- b. Membandingkan hasil F<sub>sig</sub> dengan nilai probabilitas  $\alpha$  0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika F<sub>sig</sub> >  $\alpha$  0,05 berarti H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak

Jika F<sub>sig</sub> ≤  $\alpha$  0,05 berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima

$$Fh = \frac{R^2 \int k}{(1 - r^2) \int (n - k - 1)}$$

(Sugiyono, 2012)

Dimana : (R = Koefisien korelasi berganda; K = Jumlah variabel bebas; N = sampel)

### 3.7.2.3 Koefisien Dertiminasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari adjusted R square. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan

1. Apabila nilai R-square, semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan: (Sugiyono, 2012)

(KD = Koefisien Determinasi; r<sup>2</sup> = Nilai Korelasi Berganda; 100% = Persentase Kontribusi).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berdasarkan Kepada Undang-undang No. 10 Tahun 1948, atas usul Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tgl. 16 Februari 1973 No. 4585/25. DPRD tingkat I Sumatera Utara dengan keputusan tgl.13 Agustus 1973 No. 19/K/1973 Telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah tgl 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya U.U.No. 10 tahun 1948 tersebut. Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat R.I dalam bentuk Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.M dibentuklah provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli / Sumatera Timur. Kemudian dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1950. TGL 14 Agustus 1950. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.M. Tahun 1949 tersebut dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara dengan Daerah yang meliputi Daerah Keresidenan Aceh. Sumatera Timur dan Tapanuli. Selanjutnya dengan peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tgl. 14 Agustus 1950 (pada waktu R.I.S) ditetapkan bahwa Daerah R.I.S sesudah terbentuk Negara Kesatuan R.I. Terbagi atas daerah-daerah Provinsi: (a. Jawa Barat; b. Jawa Tengah; c. Jawa Timur; d. Sumatera Utara; e. Sumatera Tengah; f. Sumatera Selatan; g. Kalimantan; h. Sulawesi; i. Maluku; j. Sunda Kecil). Dalam Perkembangan Selanjutnya tgl. 7 Desember 1956 diundangkanlah Undang-undang No. 24 Tahun 1956 yaitu Undang-undang tentang pembentukan, Daerah Otonom

Provinsi Aceh dan perubahan peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.  
Pasal I Undang-undang No. 24 Tahun 1956 ini menyebutkan:

1. Daerah Aceh yang meliputi Kabupaten-kabupaten : I Aceh besar, 2. Aceh Pedie ,3.Aceh Utara, 4 Aceh Timur, 5. Aceh Tengah, 6.Aceh Barat, 7. Aceh Selatan,8. Kota Besar Kuta Raja, dipisahkan dari lingkungan, Daerah Otonom Provinsi Sumatera Utara dimaksud dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 an dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Provinsi Aceh.
2. Provinsi Sumatera Utara Tersebut dalam ayat (1) yang wilayahnya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai Daerah Otonom Provinsi Aceh tetap disebut Provinsi Sumatera Utara Jumlah Daerah Otonom tingkat II di Sumatera Utara. berdasarkan undang-undang Darurat No. 7 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar. Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.II adalah 17 buah, saat ini di Sumatera Utara terdiri dari :
  - a. 25 Kabupaten Yaitu: ( Kabupaten Tapanuli Tengah; Kabupaten Tapanuli Utara; Kabupaten Tapanuli Selatan; Kabupaten Nias; Kabupaten Langkat; Kabupaten Karo; Kabupaten Deli Serdang; Kabupaten Simalungun; Kabupaten Asahan; Kabupaten Labuhan

Batu; Kabupaten Dairi; Kabupaten Pak-pak Barat; Kabupaten Humbang Hasudutan; Kabupaten Serdang Berdagai; Kabupaten Toba Samosir; Kabupaten Samosir Sidimpuan; Kabupaten Nias Selatan; Kabupaten Mandailing Natal; Kabupaten Batu Bara; Kabupaten Padang Lawas; Kabupaten Padang Lawas Utara; Kabupaten Labuhan Batu Utara; Kabupaten Labuhan Batu Selatan; Kabupaten Nias Utara; Kabupaten Nias Barat).

- b. 8 Kota Yaitu: (Kota Medan, Kota Pematang Siantar. Kota Sibolga; Kota Tanjung Balai; Kota Binjai; Kota Tebing Tinggi; Kota Padang Sidimpuan; Kota Gunung Sitoli).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomer 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Biro Keuangan Setdaprovsu yang merupakan salah satu SKPD dilingkungan Sekeretariat Daerah Provsu. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomer 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomer 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekdaprovsu dan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset. Sehubungan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota maka terbit Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terakhir terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### 4.1.2 Karakteristik Responden

Dalam menyebarkan angket yang penulis lakukan terhadap 37 responden tentu memiliki perbedaan karakteristik baik itu secara usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan serta lama bekerja. Banyaknya pegawai yang bekerja di Badan Keuangan Dan Aset Daerah, oleh karena itu perlu adanya pengelompokan untuk masing-masing identitas pribadi para responden, berikut adalah bagian dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah :

**Tabel 6.1**  
**Data Jumlah Responden BKAD PROVSU**

NO.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Sub Bagian	5
5	Kepala Sub Bidang	15
6	Kelompok Jabatan Fungsional	10
	<b>Total</b>	37

Dalam penelitian jumlah responden yang menjadi sampel penelitian adalah 37 orang, identitas diri yang ditanyakan adalah Jenis kelamin, Usia dan Pendidikan. Tabel-tabel dibawah ini akan menjelaskan karakteristik responden penelitian.

### a. Jenis kelamin Responden

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	18	51,4%
Perempuan	19	48,6%
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

(Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah)

Dari tabel diatas terlihat persentase jenis kelamin responden, dimana terlihat responden yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 18 orang (51,4%) dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 19 orang (48,6%).

### b. Usia Responden

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
20 - 35 Tahun	17	45,9%
36 – 45 Tahun	11	29,8%
46 – 55 Tahun	09	24,3%
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

(Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah)

Dari tabel diatas terlihat persentase usia responden menunjukkan dalam penelitian ini sebagian besar berumur 25-5 tahun yaitu sebanyak 17 responden, kemudian dengan umur antara 36–45 tahun sebanyak 11 responden, serta berumur 46-55 tahun sebanyak 9 responden dalam penelitian ini.

### 1. Pendidikan Responden

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
S1	32	86,5%
S2	05	13,5%
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

(Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah)

Dari tabel diatas terlihat persentase pendidikan responden, dimana terlihat responden yang berpendidikan lulusan S1 berjumlah 32 orang (86,5%) dan yang berpendidikan yang lulusan S2 berjumlah 5 orang (13,5%).

#### 4.1.3 Analisis Persentase Jawaban Responden

Sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut, terlebih dahulu peneliti melakukan pendistribusian jawaban responden, untuk melihat apakah kondisi di lapangan sesuai dengan jawaban responden, dalam penelitian ini digunakan skala likert dengan Skor 1-5.

**Tabel 4.5**  
**Kriteria Jawaban Responden**

Kriteria	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

#### 4.1.3.1 Persentase Responden Variabel Penerapan Akuntansi Pemerintahan

**Tabel 4.6**  
**Persentase Jawaban Variabel Penerapan Akuntansi Pemerintahan**

NO	Uraian Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Laporan keuangan merupakan media pertanggung jawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas.	16	43,2%	18	38,6%	3	8,1%	-	-	-	-
2.	Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang	9	24,3%	26	70,3%	2	5,4%	-	-	-	-

	berkepentingan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.										
3.	Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur-unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur-unsur laporan keuangan,	10	27%	24	64,9%	3	8,1%	-	-	-	-
4.	Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik.	27	27%	24	64,9%	3	8,1%	-	-	-	-
5.	Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya.	5	13,5%	25	67,6%	6	16,2%	1	2,7%	-	-
6.	Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.	7	18,9%	20	54,1%	10	27%	-	-	-	-
7.	Laporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib di sepakatin oleh DPRD.	8	21,6%	21	56,8%	7	18,9%	1	2,7%	-	-

8.	Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi..	10	27%	18	48,6%	9	24,3%	-	-	-	-
9.	Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.	13	35,1%	18	48,6%	6	16,2%	-	-	-	-
10.	Jumlah koreksi periode sebelumnya dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas serta Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya.	10	27%	25	67,6%	2	5,4%	-	-	-	-

(Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah)

Penerapan akuntansi pemerintahan sudah berjalan dengan baik di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terlihat dari jawaban responden yang mayoritasnya adalah setuju artinya Penerapan akuntansi pemerintahan sudah mengalami peningkatan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, adapun hal yang tidak disetujui dan mengalami penurunan menurut responden adalah mengenai Laporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib di sepakatin oleh DPRD dan mengenai laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya.

#### 4.1.3.2 Persentase Responden Variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

**Tabel 4.7**  
**Persentase Jawaban Variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan**

NO	Uraian Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sesuai	16	43,2%	20	54,1%	1	2,7%	-	-	-	-



	dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.										
2.	Informasi dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.	8	21,6%	26	70,3%	3	8,1%	-	-	-	-
3.	Informasi dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu (feedback value)	8	21,6%	25	67,6%	4	10,8%	-	-	-	-
4.	Informasi dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa datang (predictive value).	9	24,3%	24	64,9%	4	10,8%	-	-	-	-
5.	Informasi yang dihasilkan dari Laporan Keuangan pemerintahan daerah telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.	9	24,3%	24	64,9%	4	10,8%	-	-	-	-
6.	Informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu	6	16,2%	27	73%	4	10,8%	-	-	-	-
7.	Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	6	16,2%	26	70,3%	4	10,8%	1	2,7%	-	-
8.	pemerintahan daerah menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.	12	32,4%	20	54,1%	5	13,5%	-	-	-	-
9.	Infomasi yang dihasilkan dari Laporan Keuangan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas	16	43,2%	15	40,5%	6	16,2%	-	-	-	-

	pemahaman para pengguna.										
10.	Laporan Keuangan pemerintahan daerah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.	12	32,4%	22	59,5%	3	8,1%	-	-	-	-

(Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah)

Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan sudah berjalan dengan baik di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terlihat dari jawaban responden yang mayoritasnya adalah Sangat setuju artinya Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan sudah mengalami peningkatan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara , adapun hal yang tidak disetujui dan mengalami penurunan menurut responden adalah mengenai Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

#### 4.1.3.3 Persentase Responden Variabel Akuntabilitas Kinerja Intansi

##### Pemerintah

**Tabel 4.8**  
**Persentase Jawaban Variabel Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah**

NO	Uraian Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi	3	8,1%	30	81,1%	4	10,8%	-	-	-	-
2.	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.	1	2,7%	28	75,7%	8	21,6%	-	-	-	-
3.	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikato kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.	4	10,8%	33	89,2%	-	-	-	-	-	-
4.	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin	8	21,6%	29	78,4%	-	-	-	-	-	-

5.	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan	7	18,9%	29	78,4%	1	2,7%	-	-	-	-
6.	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan	29	78,4%	8	21,6%	-	-	-	-	-	-
7.	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.	14	37,8%	19	51,4%	4	10,8%	-	-	-	-
8.	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program	8	21,6%	29	78,4%	-	-	-	-	-	-
9.	LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan	25	67,6%	12	32,4%	-	-	-	-	-	-
10.	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.	5	13,5%	26	70,3%	6	16,2%	-	-	-	-

(Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah)

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah sudah berjalan dengan baik di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terlihat dari jawaban responden yang mayoritasnya adalah Sangat setuju artinya Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah sudah mengalami peningkatan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara , adapun hal yang tidak disetujui dan mengalami penurunan lebih dari 5% menurut responden adalah mengenai Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan, Kegiatan /program yang disusun telah mengakomodir setiap

perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat dan Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.

## 4.2 Pengujian Instrumen

### 4.2.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas ini dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (variabel kunci yang sedang diteliti). Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas dihitung dengan menggunakan kolerasi person dan setelah dilakukan pengukuran dengan SPSS versi 29 akan dilihat tingkat signifikan atas semua pertanyaan.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Validitas**

Item Pertanyaan	R-hitung	R-Tabel	Hasil uji
<b>Penerapan Akuntans Pemerintahan (X1)</b>			
X1.1	0,527	0,325	<b>Valid</b>
X1.2	0,483	0,325	<b>Valid</b>
X1.3	0,484	0,325	<b>Valid</b>
X1.4	0,484	0,325	<b>Valid</b>
X1.5	0,522	0,325	<b>Valid</b>
X1.6	0,513	0,325	<b>Valid</b>
X1.7	0,522	0,325	<b>Valid</b>
X1.8	0,500	0,325	<b>Valid</b>
X1.9	0,609	0,325	<b>Valid</b>
X1.10	0,517	0,325	<b>Valid</b>
<b>Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)</b>			
X2.1	0,417	0,325	<b>Valid</b>
X2.2	0,424	0,325	<b>Valid</b>
X2.3	0,446	0,325	<b>Valid</b>
X2.4	0,438	0,325	<b>Valid</b>
X2.5	0,372	0,325	<b>Valid</b>
X2.6	0,599	0,325	<b>Valid</b>
X2.7	0,432	0,325	<b>Valid</b>
X2.8	0,587	0,325	<b>Valid</b>
X2.9	0,529	0,325	<b>Valid</b>
X2.10	0,579	0,325	<b>Valid</b>
<b>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)</b>			
Y.1	0,486	0,325	<b>Valid</b>
Y.2	0,467	0,325	<b>Valid</b>

Y.3	0,523	0,325	<b>Valid</b>
Y.4	0,551	0,325	<b>Valid</b>
Y.5	0,475	0,325	<b>Valid</b>
Y.6	0,522	0,325	<b>Valid</b>
Y.7	0,479	0,325	<b>Valid</b>
Y.8	0,461	0,325	<b>Valid</b>
Y.9	0,452	0,325	<b>Valid</b>
Y.10	0,477	0,325	<b>Valid</b>

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2023)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid. Dari tabel di atas terlihat nilai uji validitas untuk X,X2 dan Y dimana semua instrument bernilai lebih tinggi dari 0,325 ini artinya semua instrument yang digunakan untuk penelitian valid dan layak untuk di lanjutkan penelitiannya.

#### 4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut reliabel atau tidak, maka dilakukan pengujian reabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS 29. Uji reabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Secara umum, suatu instrumen dikatakan bagus jika memiliki koefisiensi Cronbach's alpha  $> 0,60$ .

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	R-Tabel	Keterangan
<b>Penerapan Akuntans Pemerintahan (X1)</b>	0,694	0,60	<b>Reliabel</b>
<b>Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)</b>	0,633	0,60	<b>Reliabel</b>
<b>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)</b>	0,626	0,60	<b>Reliabel</b>

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2023)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat reliabilitas instrument penelitian sudah memadai karena semua nilai Cronbach Alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,60. Dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dari setiap variabel sudah

menjelaskan atau memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti atau dengan kata lain instrument adalah reliabel atau terpercaya.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Statistik deskriptif ini meliputi beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi data, tabulasi silang dan analisis rasio yang menggunakan Minimum, Maksimum, Mean, Standard Deviasi.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Akuntansi Pemerintahan	37	32	48	41.08	3.427
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	37	37	49	41.68	2.887
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	37	38	47	42.19	2.234
Valid N (listwise)	37				

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023)

Penerapan akuntansi pemerintah memiliki nilai N 37 dan dari hasil uji statistik menggunakan software SPSS mendapatkan nilai minimum sebesar 32,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai dari variabel penerapan akuntansi pemerintah. Dari hasil uji statistik variabel X1 nilai maksimum mendapatkan nilai sebesar 48,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai dari variabel penerapan akuntansi pemerintah. Dari hasil uji statistik variabel X1 nilai mean sebesar 41,08 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari variabel penerapan akuntansi pemerintah dan pada hasil uji statistik nilai variabel X1 standard deviation sebesar 3,427 dari hasil uji variabel X1(penerapan akuntansi pemerintahan) yang di hasilkan dari penelitian ini menggunakan software SPSS v.29.

Pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki nilai N 37 dan dari hasil uji statistik menggunakan software SPSS mendapatkan nilai minimum sebesar 37,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai dari variabel Pengawasan kualitas laporan keuangan. Dari hasil uji statistik variabel X2 mendapatkan nilai maksimum sebesar 49,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai dari variabel Pengawasan kualitas laporan keuangan. Dari hasil uji statistik variabel X2 mendapatkan mean sebesar 41,68 yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari variabel Pengawasan kualitas laporan keuangan dan pada hasil uji statistik variabel X2 mendapatkan nilai standard deviation sebesar 2,887 dari hasil uji variabel X2(pengawasan kualitas laporan keuangan) yang di hasilkan dari penelitian ini menggunakan software SPSS v.29.

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah memiliki nilai N 37 dan dari hasil uji statistik menggunakan software SPSS mendapatkan nilai minimum sebesar 38,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dalam penelitian ini adalah 38,00. Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah memiliki nilai N 37 dan dari hasil uji statistik menggunakan software SPSS mendapatkan nilai maksimum sebesar 47,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dalam penelitian ini adalah 47,00. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai N 37 dan dari hasil uji statistik menggunakan software SPSS mendapatkan nilai mean sebesar 42,19 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini adalah 41,19 dan penyimpangan terhadap rata-rata (standard deviation) sebesar 2,234.

### 4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2016) Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebagai berikut:

#### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk melakukan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan tabel Grafik Normal Probability Plot (P-Plot). Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dalam sebuah model regresi, yaitu variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.

Menurut Ghozali (2016) dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu (a. jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal, b. jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi data normal).

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Kolmogorov-smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.81003644
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.070
	Negative	-.147
Test Statistic		.147
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.043
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.041
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound
		.036
		.046

a. Test distribution is Normal.

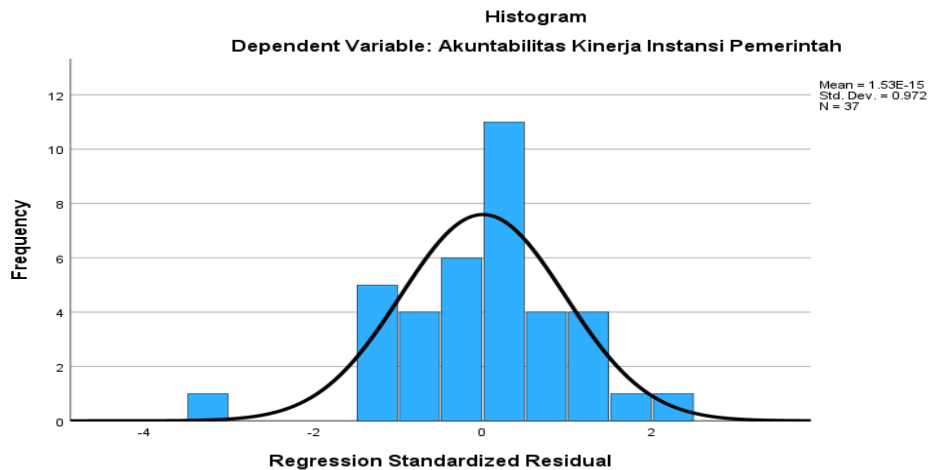
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 112562564.

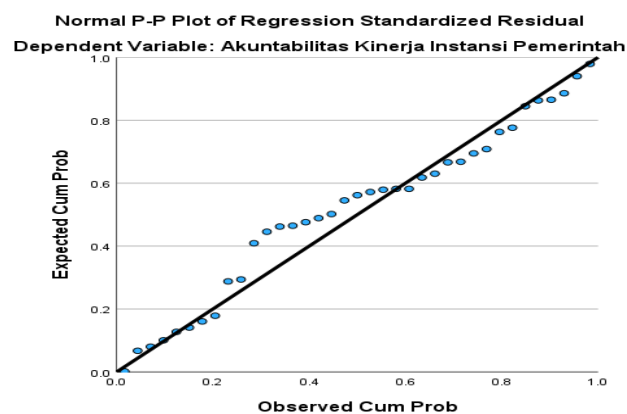


Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas komogorov-smirnov diketahui nilai dari semua variabel terlihat dari nilai Asymp.Sig (2-tailed)  $0,043 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.



**Gambar 4.1 Histogram Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa grafik histogram menunjukkan bahwa pola berdistribusi normal karena kurva memiliki kecenderungan yang berimbang, baik pada sisi kiri maupun kanan dan kurva berbentuk menyerupai lonceng yang sempurna.



**Gambar 4.2 Grafik P-Plot Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Pada grafik normal p-plot terlihat pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya problem multikolineritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran kolerasi antar variabel independen. Data dikatakan tidak multikolinearitas apabila  $T \Rightarrow > 0,1$  Dan nilai  $VIF \Rightarrow < 10$ .

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.911	6.027		2.806	.008		
	Penerapan Akuntansi Pemerintahan	.282	.091	.432	3.101	.004	.996	1.004
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	.329	.108	.425	3.054	.004	.996	1.004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

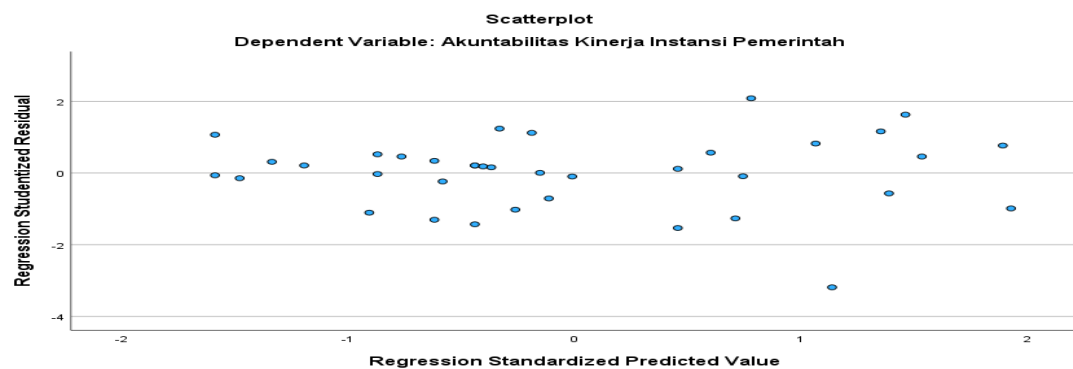
(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai VIF X1 dan X2 adalah 1,004 < 10 dan nilai tolerance value 0,996 > 0,1 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain, karena karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi (Ghozali, 2016). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya uji heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat grafik scatterplot. Dari hasil pengolahan data statistik dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.3 Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan gambar grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

#### **4.3.2.4 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2016, hal. 110). Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam satu model regresi dilakukan melalui uji autokorelasi dilihat dari nilai tabel Durbin Watson dengan nilai hitung Durbin

Watson. Jika hasil nilai Durbin Watson diantara  $dU-4dU$ , maka dikatakan dalam data tidak terjadi autokorelasi, berikut hasil dari uji autokorelasi.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.586 <sup>a</sup>	.344	.305	1.863	2.197

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan , Penerapan Akuntansi Pemerintahan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023)

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi dihitung sebagai berikut :

$$(n = 37, d = 2,197, dL = 1,307, dU = 1,655, 4-dL = 4 - 1,307 = 2,693, 4-dU = 4 - 1,655 = 2,345)$$

$$\text{Hasil} = dU < d < 4-dU$$

$$= 1,655 < 2,197 < 2,345$$

Kesimpulan : Tidak Terdapat Autokorelasi

### 4.3.3 Hasil Uji Asumsi Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dan layak dilakukan analisis regresi. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 29, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

#### a. Persamaan Regresi

Menurut Sugiyono (2013:298) Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui

pengaruh pengendalian internal, pengembangan mutu pegawai terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 29, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Coefficients (Hasil Regresi Linier Berganda)**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Model						
1	(Constant)	16,911	6,027		2,806	,008
	Penerapan Akuntansi Pemerintahan	,282	,091	,432	3,101	,004
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	,329	,108	,425	3,054	,004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023)

Berdasarkan tabel diatas didapatlah persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16,911 + 0,282 X_1 + 0,329 X_2 + e$$

Keterangan:

1. konstanta sebesar 16,911 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ( $X_1 = 0$ ,  $X_2 = 0$ ) maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 16,911.
2.  $\beta_1$  sebesar 0,282 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan akuntansi pemerintahan sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,282 dengan asumsi variabel lain tetap.
3.  $\beta_2$  sebesar 0,329 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pengawasan kualitas laporan keuangan sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,329 dengan asumsi variabel lain tetap.

### 4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

#### 4.3.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016) uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan cara melihat nilai t hitung terhadap t tabel. Apabila nilai t hitung  $\geq$  t tabel, maka  $H_0$  ditolak (terdapat pengaruh secara parsial). Uji statistik t dapat juga dilakukan dengan melihat sig  $<$  0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila sig  $>$  0,05, maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial).

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan SPSS versi 29 maka diperoleh hasil uji statistik t sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Statistik t (Parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	16.911	6.027		2.806	.008
	Penerapan Akuntansi Pemerintahan	.282	.091	.432	3.101	.004
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	.329	.108	.425	3.054	.004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023)

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari :

1. Penerapan akuntansi pemerintahan

Hipotesis : penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

$t_{hitung} > t_{tabel}$  (3,101 > 2,032)

Nilai signifikansi 0,004 < 0,05

Maka H0 ditolak sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 2. Pengawasan kualitas laporan keuangan

Hipotesis : Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas

$$t_{hitung} > t_{tabel} (3,054 > 2,032)$$

$$\text{Nilai signifikansi } 0,004 < 0,05$$

Maka H0 ditolak sehingga Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 4.3.4.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Menurut ghozali uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara Bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bisa dilihat dibawah ini.

**Tabel 4.17**  
**ANOVA (Hasil Uji Statistik f (Simultan))**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.731	2	30.866	8.898	<.001 <sup>b</sup>
	Residual	117.944	34	3.469		
	Total	179.676	36			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan , Penerapan Akuntansi Pemerintahan

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023)

Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 8.898 dengan tingkat signifikansi 0,001, sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2,88 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan, Pengawasan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $8,898 > 2,88$ ) dan signifikansi penelitian  $< 0,05$  ( $0,001 < 0,05$ ).

#### 4.3.4.3 Uji koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Ghozali uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-square semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengujian statistiknya :

**Tabel 4.18**  
**Model Summary (Hasil Uji Statistik R<sup>2</sup> (Determinasi))**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.586 <sup>a</sup>	.344	.305	1.863

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Akuntansi Pemerintahan

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,305 atau 30,5%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan sebesar 30,5% oleh variabel independen yaitu penerapan akuntansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan. Sedangkan 69,5% variasi bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen penelitian ini.



#### **4.4 Pembahasan**

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai hasil pengolahan data terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya, serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut, Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **4.4.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar  $0,004 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan akuntansi pemerintahan ( $X_1$ ) Akuntansi pemerintahan memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggung jawaban publik (Bastian. 2014).

Sebagaimana dengan penelitian Fedrianawati (2017) penerapan akuntansi sektor publik, menunjukkan bahwa secara parsial penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan secara simultan penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila dengan telah diterapkan akuntansi pemerintahan didalam instansi pemerintah pada BKAD Provinsi Sumatera Utara maka kinerja suatu instansi tersebut mengalami perbaikan ke yang lebih baik lagi.

#### **4.4.2 Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil pengujian uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta variabel independen. Dimana signifikansinya  $0,004 < 0,05$ . Hal ini menyatakan bahwa Pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Dalam teorinya, Pengawasan merupakan hal penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan (Kadarman 2001).

Pengawasan kualitas laporan keuangan di BKAD Provinsi Sumatera Utara sangat berpengaruh dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Adapun demikian, faktor pengawasan kualitas laporan keuangan akan menjadi pemicu yang memberikan dampak positif jika faktor ini dikaitkan dengan teori penerapan akuntansi sektor publik, sebagaimana dengan penelitian (Wina & Khairani, 2014). Penelitian tersebut memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **4.4.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Dari uji ANOVA atau F test, dapat diketahui bahwa kompetensi akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $8,898 > 2,88$ ) dan signifikansi penelitian  $< 0,05$  ( $0,001 < 0,05$ ). Pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi melalui adjusted R Square sebesar 0,305 yang menunjukkan bahwa besarnya diperoleh nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,305 atau 30,5%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan sebesar 30,5% oleh variabel independen yaitu penerapan akuntansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan. Sedangkan 69,5% variasi bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen penelitian ini.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (2010) dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Sebagaimana dengan penelitian Wina & Khairani (2014). Hasil dari penelitian mereka, menunjukkan bahwa kedua variabel secara simultan berpengaruh positif. Semakin tinggi pengaruh standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan maka akan meningkatkan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik pula dan apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara independensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar pemerintahan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan pada bab IV maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas pemerintah yang lebih baik.
2. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen.
3. Penerapan akuntansi pemerintahan dan Pengawasan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang akan diberikan kepada instansi pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara untuk peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini agar menjadi lebih sempurna. Saran- saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset daerah Provinsi Sumatera Utara agar lebih meningkatkan lagi kinerja dalam bekerja sehingga tujuan dari instansi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dan meningkatkan kembali kompetensi bagi setiap staf keuangan maupun akuntansi, agar lebih meningkatkan kualitas atas laporan keuangan dan juga diharapkan mempertahankan penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang telah digunakan serta pengelolaan keuangan agar dapat di laporkan dalam tepat waktu.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan menambah variabel - variabel lain seperti kemampuan pengorganisasian, kemampuan kepemimpinan, kemampuan pengendalian yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas dan diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta
- Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Arif, Bachtiar dkk. 2002. “Akuntansi Pemerintahan”. Jakarta : Salemba Empat
- Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 2001. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah. Edisi 4, BPFE Yogyakarta.
- Arinta, Kustadi. 1996. Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arjuna, Annie Mustika Putri. 2019. “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” *Daerah: Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, Vol. 9 No. 2, Desember 2019.
- Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2018). *Lex Crimen*, 6(10), 1–11.
- Arens Randal J. Elder Mark S. Beasley. 2017. “*Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (16 ed.)*”. England: Pearson.
- Asep Saepul H Dan Bahruddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik. Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Eka Nurmala Sari. 2016. “*Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi: Kasus Pada Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara, Indonesia*”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hafsah, Ramdhansyah, Hasan Sakti Siregar, 2014, “*Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Husein Umar (2007). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta Pustaka Utama
- Intan Fedrianawati, Erlina .(2017).”*Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.
- Institut Pertanian Bogor. 2019. Laporan Kinerja Berdasarkan Kontrak Kinerja IPB – Kemenristekdikti, IPB Press.Ikhtisar
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). “*Metode Penelitian Bisnis*”. Medan: Umsu Pers.
- Juliandi A, Irfan dan Manurung S. 2014. “*Metodologi Penelitian Bisnis*”. Medan: UMSU PRESS.
- Kadarman dan Jusuf Udaya 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Gloria.
- Khaula.Senasri. 2021. “*Pengertian Kas Menurut Para Ahli, Jenis, dan Karakteristiknya*”. Author at Accurate Online.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Mentoring dan Evaluasi Keuangan Satuan Kerja. “*Sejarah Akuntansi Pemerintahan*”. Situs: <https://monevkeu.ekon.go.id>
- Nining Asniar Ridzal. 2020. “*Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton*”.: Volume 6-Nomor 1, Juni 2020, (Hlm 87-97).
- Novien Rialdy. 2018. “*Analisis Laporan Keuangan Dengan Metode Trend Sebagai Dasar Menilai Kondisi Keuangan Di Rumah Sakit Umum Haji Medan*” Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Purba, Novdin M. Sianturi . (2021). *Akuntansi Manajemen untuk Ekonomi dan Teknik*. Cetakan pertama. BukuKita.com : Gramedia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2018.



- Pratiwi, S. (2013).” *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*”. Jurnal Unikom.
- Rusiadi., Subiantoro, Nur dan Hidayat, Rahmat. (2016). “*Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan*”. Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel. Medan:USU Press.
- Saragih,Fitriani. 2014, “*Pengaruh Penerapan Akuntansi PemerintahanDan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD SE Kota Medan*” Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Sriningsih, M., Hatidja, D. and Prang, J. D. (2018) “*Penanganan Multikolinearitas Dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras di Provinsi Sulut*”, Jurnal Ilmiah Sains, 18(1), p. 18. doi: 10.35799/jis.18.1.2018.19396.
- Sugiyono. 2012. *MemahaminPenelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wina, I. P., & Khairani, S. (2014). “*Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Stsudi kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov)*”. Jurnal: DocoBook.
- Zulia Hanum. 2009. “*Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pengeluaran Kas*”. Jurnal Manajemen & Bisnis,ISSN : 1693-7619, Vol 08 no 02 April 2009.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian dan Jawaban Responden

Bagian 1 dari 6

### KUESIONER PENELITIAN TENTANG PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bapak/Ibu Responen yang Terhormat,  
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak/ibu mengisi kuesioner ini. Adapun kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : Muhammad Syahputra Rizki  
NPM : 1905170345  
Jurusan / Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi  
Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul " PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ".

Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenaan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i ditempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti  
Muhammad Syahputra Rizki

Bagian 2 dari 6

#### Demografi Responden

Pentunjuk pengisian jawaban kuesioner. isilah jawaban pertanyaan yang disediakan sesuai dengan jawaban Anda.

Usia Responden : \*

20 - 35 Tahun  
 36 - 45 Tahun  
 46 - 55 Tahun

Jenis Kelamin Responden : \*

Laki-Laki  
 Perempuan

Pendidikan Terakhir : \*

SMA  
 Diploma  
 S1  
 S2

Bagian 3 dari 6

### Penerapan Akuntansi Pemerintahan (X1)

Cara Pengisian Kuesioner Bapak/Ibu/Saudara/i cukup mengisi jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan Checklist Symbol (✓) pada kolom yang telah disediakan. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/nilai jawaban adalah sebagai berikut :

(SS) Sangat Setuju = Skor 5  
 (S) Setuju = Skor 4  
 (KS) Kurang Setuju = Skor 3  
 (TS) Tidak Setuju = Skor 2  
 (STS) Sangat Tidak Setuju = Skor 1

- Laporan keuangan merupakan media pertanggung jawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur-unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur-unsur laporan keuangan.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Laporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib di sepakatin oleh DPRD.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Jumlah koreksi periode sebelumnya dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas serta Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju

## Bagian 4 dari 6

## Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)

Cara Pengisian Kuisioner Bapak/Ibu/Saudara/i cukup mengisi jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan Checklist Symbol (✓) pada kolom yang telah disediakan. Setiap pernyataan mengharuskan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu? Saudara/i. Skor/nilai jawaban adalah sebagai berikut :

(SS) Sangat Setuju	= Skor 5
(S) Setuju	= Skor 4
(KS) Kurang Setuju	= Skor 3
(TS) Tidak Setuju	= Skor 2
(STS) Sangat Tidak Setuju	= Skor 1

1. Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

2. Informasi dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

3. Informasi dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu (feedback value).

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

4. Informasi dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa datang (predictive value).

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

5. Informasi yang dihasilkan dari Laporan Keuangan pemerintahan daerah telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

6. Informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

7. Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

8. Pemerintahan daerah menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

9. Informasi yang dihasilkan dari Laporan Keuangan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

10. Laporan Keuangan pemerintahan daerah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

Bagian 5 dari 6

**Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Cara Pengisian Kuesioner Bapak/Ibu/Saudara/i cukup mengisi jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan Checklist Symbol (✓) pada kolom yang telah disediakan. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/nilai jawaban adalah sebagai berikut :

(SS) Sangat Setuju	= Skor 5
(S) Setuju	= Skor 4
(KS) Kurang Setuju	= Skor 3
(TS) Tidak Setuju	= Skor 2
(STS) Sangat Tidak Setuju	= Skor 1

1. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi. \*

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

2. Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan. \*

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

3. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikato kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program. \*

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

4. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin. \*

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

5. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. \*

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

6. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan. \*

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

7. Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. \*

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

8. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program. \*

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

9. LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. \*

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju

10. Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat. \*

- Sangat Setuju  
 Setuju  
 Kurang Setuju  
 Tidak Setuju  
 Sangat Tidak Setuju





NO.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)										Total Y1
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	40
2	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	42
3	5	4	5	5	4	5	3	4	4	3	42
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
5	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	39
6	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	44
7	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	41
8	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	41
9	4	3	4	4	4	5	5	4	5	4	42
10	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	47
11	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	41
12	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42
13	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42
14	4	4	4	4	4	5	5	4	5	3	42
15	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	41
16	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
17	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	39
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	42
20	4	4	4	4	4	5	4	4	5	3	41
21	4	4	4	4	4	5	5	4	5	3	42
22	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	42
23	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	42
24	4	3	4	4	4	5	4	4	5	3	40
25	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	43
26	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
27	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	44
28	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	43
29	4	4	4	4	3	4	3	4	5	3	38
30	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	44
31	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	46
32	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	40
33	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	47
34	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43
35	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	46
36	4	3	4	5	4	4	5	5	5	4	43
37	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	45



## Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Item Pertanyaan	R-hitung	R-Tabel	Hasil uji
<b>Penerapan Akuntans Pemerintahan (X1)</b>			
X1.1	0,527	0,325	<b>Valid</b>
X1.2	0,483	0,325	<b>Valid</b>
X1.3	0,484	0,325	<b>Valid</b>
X1.4	0,484	0,325	<b>Valid</b>
X1.5	0,522	0,325	<b>Valid</b>
X1.6	0,513	0,325	<b>Valid</b>
X1.7	0,522	0,325	<b>Valid</b>
X1.8	0,500	0,325	<b>Valid</b>
X1.9	0,609	0,325	<b>Valid</b>
X1.10	0,517	0,325	<b>Valid</b>
<b>Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)</b>			
X2.1	0,417	0,325	<b>Valid</b>
X2.2	0,424	0,325	<b>Valid</b>
X2.3	0,446	0,325	<b>Valid</b>
X2.4	0,438	0,325	<b>Valid</b>
X2.5	0,372	0,325	<b>Valid</b>
X2.6	0,599	0,325	<b>Valid</b>
X2.7	0,432	0,325	<b>Valid</b>
X2.8	0,587	0,325	<b>Valid</b>
X2.9	0,529	0,325	<b>Valid</b>
X2.10	0,579	0,325	<b>Valid</b>
<b>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)</b>			
Y.1	0,486	0,325	<b>Valid</b>
Y.2	0,467	0,325	<b>Valid</b>
Y.3	0,523	0,325	<b>Valid</b>
Y.4	0,551	0,325	<b>Valid</b>
Y.5	0,475	0,325	<b>Valid</b>
Y.6	0,522	0,325	<b>Valid</b>
Y.7	0,479	0,325	<b>Valid</b>
Y.8	0,461	0,325	<b>Valid</b>
Y.9	0,452	0,325	<b>Valid</b>
Y.10	0,477	0,325	<b>Valid</b>

Variabel	Cronbach Alpha	R-Tabel	Keterangan
<b>Penerapan Akuntans Pemerintahan (X1)</b>	0,694	0,60	<b>Reliabel</b>
<b>Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)</b>	0,633	0,60	<b>Reliabel</b>
<b>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)</b>	0,626	0,60	<b>Reliabel</b>

### Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

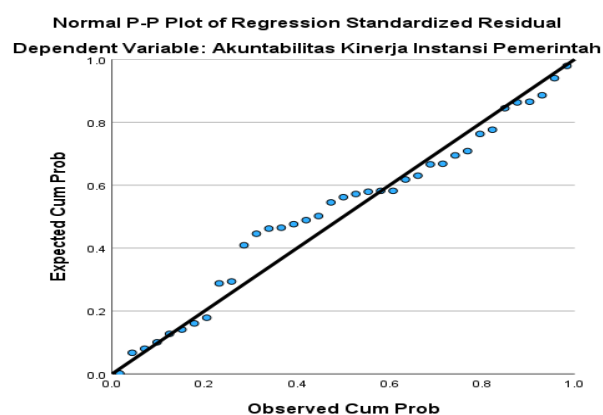
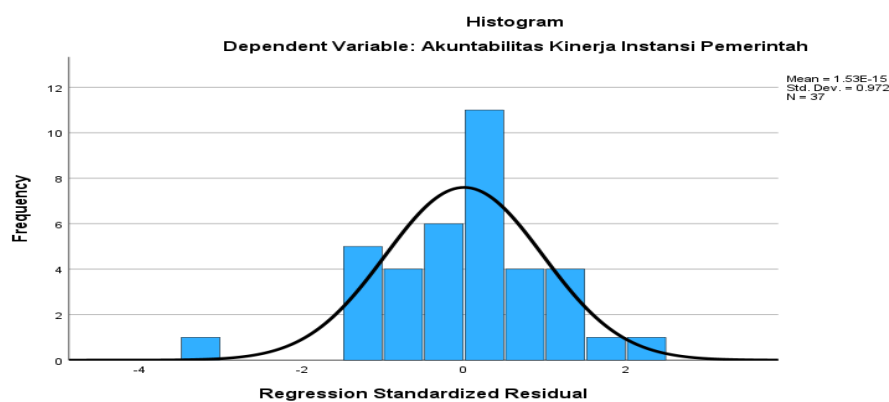
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Akuntansi Pemerintahan	37	32	48	41.08	3.427
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	37	37	49	41.68	2.887
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	37	38	47	42.19	2.234
Valid N (listwise)	37				

### Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### A. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			37
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.81003644
Most Extreme Differences	Absolute		.147
	Positive		.070
	Negative		-.147
Test Statistic			.147
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			.043
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.		.041
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.036
		Upper Bound	.046

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 112562564.



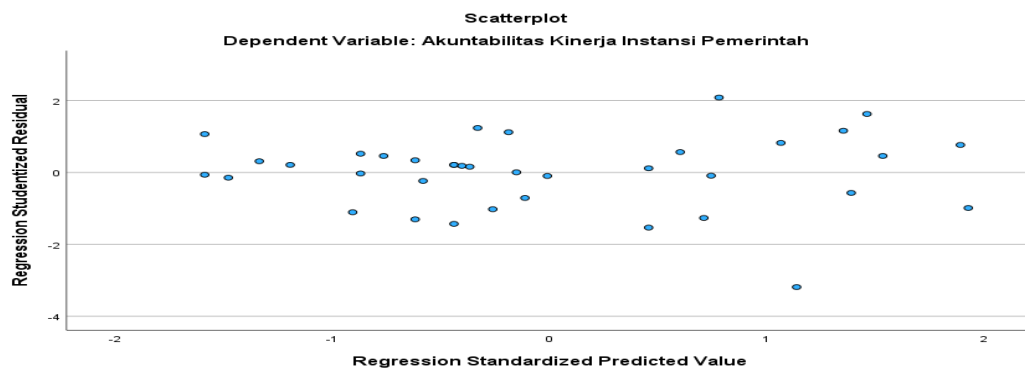
## B. Hasil Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.911	6.027		2.806	.008		
	Penerapan Akuntansi Pemerintahan	.282	.091	.432	3.101	.004	.996	1.004
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	.329	.108	.425	3.054	.004	.996	1.004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## C. Hasil Uji Heterokedastisitas



## D. Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.586 <sup>a</sup>	.344	.305	1.863	2.197

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan , Penerapan Akuntansi Pemerintahan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	16.911	6.027		2.806	.008
	Penerapan Akuntansi Pemerintahan	.282	.091	.432	3.101	.004
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	.329	.108	.425	3.054	.004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## Lampiran 6. Hasil Pengujian Hipotesis

### A. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	16.911	6.027		2.806	.008
	Penerapan Akuntansi Pemerintahan	.282	.091	.432	3.101	.004
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	.329	.108	.425	3.054	.004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### B. Uji Secara Simultan (Uji F)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	16.911	6.027		2.806	.008
	Penerapan Akuntansi Pemerintahan	.282	.091	.432	3.101	.004
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	.329	.108	.425	3.054	.004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### C. Uji koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.586 <sup>a</sup>	.344	.305	1.863

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Akuntansi Pemerintahan

## Lampiran 7. Nilai Tabel Durbin Watson

**Distribusi Nilai Tabel Durbin Watson**  
Level of Significance  $\alpha = 0,05$

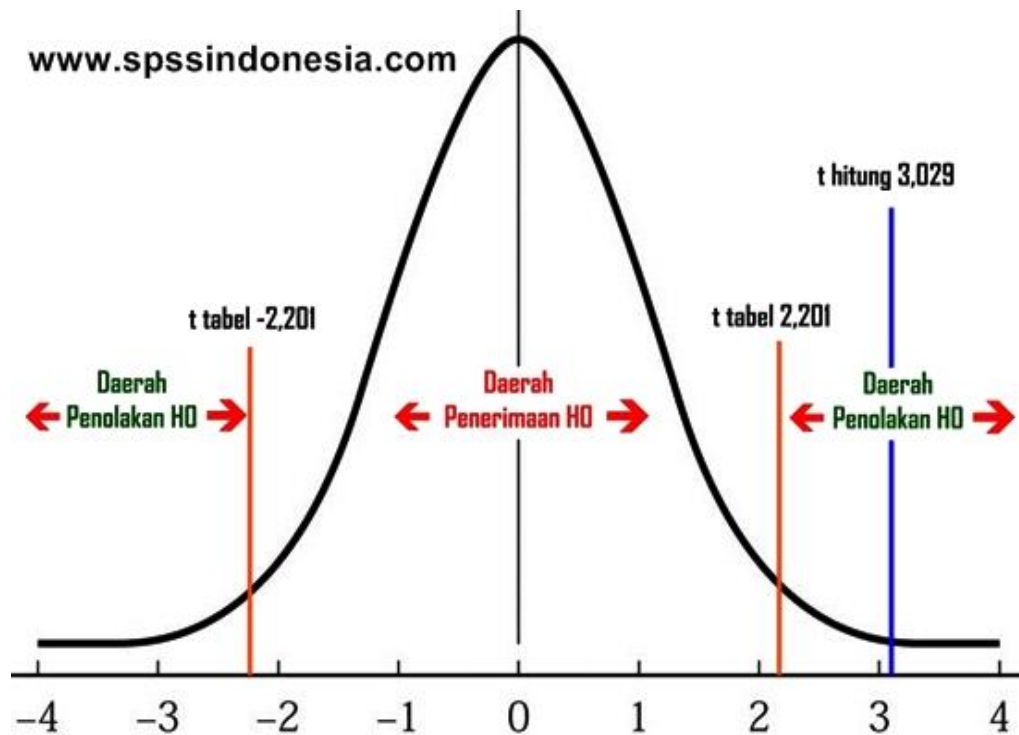
n	k'=1		k'=2		k'=3		k'=4		k'=5	
	$d_L$	$d_U$	$d_L$	$d_U$	$d_L$	$d_U$	$d_L$	$d_U$	$d_L$	$d_U$
15	1.077	1.361	0.946	1.543	0.814	1.750	0.685	1.977	0.562	2.21
16	1.106	1.371	0.982	1.539	0.857	1.728	0.734	1.935	0.615	2.15
17	1.133	1.381	1.015	1.536	0.897	1.710	0.779	1.900	0.664	2.10
18	1.158	1.391	1.046	1.535	0.933	1.696	0.820	1.872	0.710	2.06
19	1.180	1.401	1.074	1.536	0.967	1.685	0.859	1.848	0.752	2.02
20	1.201	1.411	1.100	1.537	0.998	1.676	0.894	1.828	0.792	1.99
21	1.221	1.420	1.125	1.538	1.026	1.669	0.927	1.812	0.829	1.96
22	1.239	1.429	1.147	1.541	1.053	1.664	0.958	1.797	0.863	1.94
23	1.257	1.437	1.168	1.543	1.078	1.660	0.986	1.785	0.895	1.92
24	1.273	1.446	1.188	1.546	1.101	1.656	1.013	1.775	0.925	1.90
25	1.288	1.454	1.206	1.550	1.123	1.654	1.038	1.767	0.953	1.89
26	1.320	1.461	1.224	1.553	1.143	1.652	1.062	1.759	0.979	1.88
27	1.316	1.469	1.240	1.556	1.162	1.651	1.084	1.753	1.004	1.86
28	1.328	1.476	1.255	1.560	1.181	1.650	1.104	1.747	1.028	1.85
29	1.341	1.483	1.270	1.563	1.198	1.650	1.124	1.743	1.050	1.84
30	1.352	1.489	1.284	1.567	1.214	1.650	1.143	1.739	1.071	1.83
31	1.363	1.496	1.297	1.570	1.229	1.650	1.160	1.735	1.090	1.83
32	1.373	1.502	1.309	1.574	1.244	1.650	1.177	1.732	1.109	1.82
33	1.383	1.508	1.321	1.577	1.258	1.651	1.193	1.730	1.127	1.81
34	1.393	1.514	1.333	1.580	1.271	1.652	1.208	1.728	1.144	1.81
35	1.402	1.519	1.343	1.584	1.283	1.653	1.222	1.726	1.160	1.80
36	1.411	1.525	1.354	1.587	1.295	1.654	1.236	1.724	1.175	1.80
37	1.419	1.530	1.364	1.590	1.307	1.655	1.249	1.723	1.190	1.80
38	1.427	1.535	1.373	1.594	1.318	1.656	1.261	1.722	1.204	1.79
39	1.435	1.540	1.382	1.597	1.328	1.658	1.273	1.722	1.218	1.79

## Lampiran 8. Nilai Tabel T

## Distribusi Nilai tabel

df	$t_{0,10}$	$t_{0,05}$	$t_{0,025}$	$t_{0,01}$	$t_{0,005}$
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
31	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738
33	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728
35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719
37	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715
61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.659
62	1.296	1.671	1.999	2.389	2.659
63	1.296	1.670	1.999	2.389	2.658
64	1.296	1.670	1.999	2.388	2.657
65	1.296	1.670	1.998	2.388	2.657
66	1.295	1.670	1.998	2.387	2.656
67	1.295	1.670	1.998	2.387	2.655
68	1.295	1.670	1.997	2.386	2.655
69	1.295	1.669	1.997	2.386	2.654
70	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
71	1.295	1.669	1.996	2.385	2.653
72	1.295	1.669	1.996	2.384	2.652
73	1.295	1.669	1.996	2.384	2.651
74	1.295	1.668	1.995	2.383	2.651
75	1.295	1.668	1.995	2.383	2.650
76	1.294	1.668	1.995	2.382	2.649
77	1.294	1.668	1.994	2.382	2.649
78	1.294	1.668	1.994	2.381	2.648
79	1.294	1.668	1.994	2.381	2.647
80	1.294	1.667	1.993	2.380	2.647
81	1.294	1.667	1.993	2.380	2.646
82	1.294	1.667	1.993	2.379	2.645
83	1.294	1.667	1.992	2.379	2.645
84	1.294	1.667	1.992	2.378	2.644
85	1.294	1.666	1.992	2.378	2.643
86	1.293	1.666	1.991	2.377	2.643
87	1.293	1.666	1.991	2.377	2.642
88	1.293	1.666	1.991	2.376	2.641
89	1.293	1.666	1.990	2.376	2.641
90	1.293	1.666	1.990	2.375	2.640
91	1.293	1.665	1.990	2.374	2.639
92	1.293	1.665	1.989	2.374	2.639
93	1.293	1.665	1.989	2.373	2.638
94	1.293	1.665	1.989	2.373	2.637
95	1.293	1.665	1.988	2.372	2.637
96	1.292	1.664	1.988	2.372	2.636
97	1.292	1.664	1.988	2.371	2.635

### Lampiran 9. Kurva Uji T



### Lampiran 10. Nilai Tabel F

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.97	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95

## Lampiran 11. Surat Permohonan Pengajuan Judul



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

### PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2767/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/9/8/2022

Medan, 01/01/2023

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Syahputra Rizki

NPM : 1905170345

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Adanya penyimpangan biaya operasional yang tidak menguntungkan 2. Adanya pengaruh PAD terhadap total APBD 3. Adanya Rasio Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Total Anggaran >

Rencana Judul :

1. ANALISIS BIAYA OPERASIONAL DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2. Rasio PAD terhadap Total APBD

3. Analisis Besaran Rasio Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Objek/Lokasi Penelitian: PT. PDAM Dan PT. PLN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Muhammad Syahputra Rizki)

## Lampiran 12. SK. Pembimbing Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 98/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Syahputra Rizki  
 N P M : 1905170345  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Dosen Pembimbing : **Novien Rialdy, SE., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **11 Januari 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 18 Jumadil Akhir 1444 H  
 11 Januari 2023 M



**Novien Rialdy, SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
 1. Peringgal





## Lampiran 13. Surat Persetujuan Judul Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online

Halaman ke 1 dari 2 halaman

### PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2767/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/9/8/2022

Nama Mahasiswa : Muhammad Syahputra Rizki  
NPM : 1905170345  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Pengajuan Judul : 28/11/2022  
Nama Dosen pembimbing\*) : Novien Rialdy, SE., MM (04 Januari 2023)

Judul Disetujui\*\*): Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan dan Asef Daerah

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.St.)

Keterangan:

\*) Disai oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Disai oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Medan, 10 Januari 2022

Dosen Pembimbing

(Novien Rialdy, SE., MM)

## Lampiran 14. Surat Permohonan Izin Riset



### PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 17 JUMADI AKHIR II  
09 JANUARI 2022 M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M H D S Y A H P U T R A R I Z K I

NPM : 1 9 0 5 1 7 0 3 4 5

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 2 9 S E P T E M B E R  
1 9 9 5

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L P E L I T A I N O I A

Tempat Penelitian : B A D A N K E V A N G A N D A N  
A S E T D A E R A H P R O V I N S I  
S U M A T E R A T U T A R A

Alamat Penelitian : J L I M A M B O N J O L N O 1 8

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(D. F. Zulfah Hanum, S.Psi)

Wassalam  
Pemohon

(Muhammad Syahputra Razi)

## Lampiran 15. Surat Izin Riset



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 96/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Medan, 18 Jumadil Akhir 1444 H  
 Lampiran : - 11 Januari 2023 M  
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Pimpinan  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
 Jln. Imam Bonjol No.18, Gedung Bank Sumut Lantai 7 Medan  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

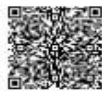
Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Syahputra Rizki  
 Npm : 1905170345  
 Program Studi : Akuntansi  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
 1. Perteinggal

Dekan  
  
**H. Januri, SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502



## Lampiran 16. Surat Izin Riset Perusahaan



### PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol No. 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7

Medan Kode Pos 20152

Medan, 27 Januari 2023

Nomor : 071/585/1/BKAD/2023

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Riset Pendahuluan

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 96/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 11 Januari 2023, perihal Izin Riset :

Nama : Muhammad Syahputra Rizki  
 NIM : 1905170345  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Pada prinsipnya tidak keberatan Mahasiswa tersebut di atas melaksanakan riset pendahuluan di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya hasil riset agar dikirim ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19, maka diminta kepada nama tersebut di atas, sebelum melakukan kegiatan penelitian agar melakukan pemeriksaan kesehatan.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN KEUANGAI  
 DAN ASET DAERAH  
 SEKRETARIS,

Drs. JULIADI ZURDANI HARAHAP, M.Si  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 19720726 199203 1 003

## Lampiran 17. Berita Acara Bimbingan Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Syahputra Rizki  
N P M : 1905170345  
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE., MM  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN  
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERITAH SUMATERA UTARA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Penyusunan dalam bahasa Inggris di bagian 1 tabel. Impact di bagian 1 tabel gelas. Lagi be perbandingan. Rincian masalah. Rincian konsep.	16/01/2023	[Signature]
Bab 2	Rujukan pustaka. Spesifikasi penelitian. Analisis tabel.	19/01/2023	[Signature]
Bab 3	Subpon harus ada di bagian pustaka. Alamat penelitian. Kriteria penelitian. Ura deskriptif di jelaskan lagi.	23/01/2023	[Signature]
Daftar Pustaka	Buat pustaka mendetail. Laporan untuk kompi. Dosen dengan bahasa. Ura deskriptif minimal. Ura deskriptif minimal gelas / tabel.	26/01/2023	[Signature]
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Seminar proposal.	31/01/2023	[Signature]

Medan, 31 Januari 2022

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing Skripsi

[Signature]  
(Novien Rialdy, SE., MM)

[Signature]  
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si.)

## Lampiran 18. Berita Acara Seminar Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

### BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 13 Februari 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :


Nama : *Muhammad Syahputra Rizki*  
NPM. : 1905170345  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 29 September 1995  
Alamat Rumah : Jln. Pelita I No.1A Medan  
Judul Proposal : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Disetujui / tidak disetujui \*)


Item	Komentar
Judul	<i>Sempurnakan judul</i>
Bab I	<i>Revisi latar belakang, identifikasi &amp; Rumusan masalah</i>
Bab II	<i>Tambah teori relevan dengan judul</i>
Bab III	<i>Revisi metode penelitian</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar pustaka</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus


Medan, 13 Februari 2023

#### TIM SEMINAR

Ketua  
  
 Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris  
  
 Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing  
  
 Novien Rialdy, SE.,MM

Pemanding  
  
 Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

## Lampiran 19. Lembar Pengesahan Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



### PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 13 Februari 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Syahputra Rizki  
NPM : 1905170345  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 29 September 1995  
Alamat Rumah : Jln. Pelita I No.1A Medan  
Judul Proposal : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Novien Rialdy, SE.,MM*

Medan, 13 Februari 2023

#### TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Novien Rialdy, SE.,MM

Pembanding

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

NIDN 010508/601

## Lampiran 20. Surat Selesai Riset



Nomor : 643/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023  
 Lamp. : -  
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 11 Sya'ban 1444 H  
 03 Maret 2023 M

Kepada Yth.  
 Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
 Jln. Imam Bonjol No.18-Gedung Bank Sumut Lantai 7 Medan Kode Pos 20152  
 Di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Syahputra Rizki  
 N P M : 1905170345  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
 1. Pertinggal

Dekan  
  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502





## Lampiran 21. Surat Selesai Riset Perusahaan



### PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Kode Pos 20157

M E D A N

Medan, 10 Maret 2023

Nomor : 000 - 1. 9 / 490 / Sekr / III / 2023  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Selesai Riset

Kepada Yth :  
Rektor UMSU  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 643/ II.3-AU/ UMSU-05/ F/ 2023 tanggal 03 Maret 2023, perihal menyelesaikan riset bahwa :

Nama : Muhammad Syahputra Rizki  
NIM : 1905170345  
Nama Priodi : Akuntansi

Telah menyelesaikan Riset di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
SEKRETARIS,



SUWITO, SE  
PEMBINA  
NIP. 19720319 199602 1 005

## Lampiran 22. Surat Keterangan Perpustakaan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
 NPP. 127120201000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) [perpustakaan\\_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 330 // KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Muhammad Syahputra Rizki  
**NIM** : 1905170345  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Jurusan** : Akuntansi

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 20 Ramadhan 1444 H  
 03 April 2023 M

Kepala Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

## Lampiran 23. Surat Permohonan Ujian Skripsi

### PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di  
Medan

Medan, 10 Maret 2023

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

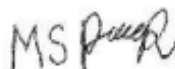
Nama Lengkap	: Muhammad Syahputra Rizki
N P M	: 1905170345
Program Studi	: Akuntansi
Alamat	: Jl. Pelita I No. 1A, Medan – Sumatera Utara
Judul Skripsi	: Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyah, Toefl, Puskibi, Skpi Prodi masing-masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (8 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan, Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukan kedalam Map warna Biru (Akuntansi), Map Warna Merah (Manajemen) Map Warna Kuning (EP),
10. Foto copy KK dan KTP ukuran A4 2 Lembar
11. Foto Copy KRS Semester berjalan
12. Surat pernyataan Kelengkapan Dokumen.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Pemohon

  
Muhammad Syahputra Rizki

Disetujui oleh  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor I

Dekan

Prof.Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Dr. H. JANURL, SE., MM., M.SI

## Lampiran 24 Surat Pernyataan

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : Muhammad Syahputra Rizki  
 N P M : 1905170345  
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 29 September 1995  
 No. KTP (NIK) : 1271182909950002  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UMSU  
 Program Studi : Akuntansi  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Lajang  
 Alamat Rumah : Jl. Pelita I No. 1A, Medan – Sumatera Utara / 081315599090  
 Pekerjaan/Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Alamat Kantor : Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan Sumatera Utara  
 20238 Indonesia / 061-6619056

Melalui surat permohonan tertanggal 10 April 2023 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan 10 Maret 2023

Saya yang Menyatakan,



(Muhammad Syahputra Rizki)

**Lampiran 25. Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : Muhammad Syahputra Rizki  
NPM : 19-05170345  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 29 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Anak Ke : 4 (Dua) dari 5 (Dua) Bersaudara  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Pelita I No,1A – Medan Perjuangan  
Email : [muhammadsyahputrarizki29@gmail.com](mailto:muhammadsyahputrarizki29@gmail.com)

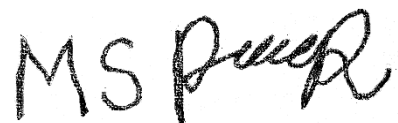
**Data Orang Tua**

Nama Ayah : Alm. Muhammad Sahar  
Nama Ibu : Rismawati  
Alamat : Jl. Pelita I No,1A – Medan Perjuangan

**Data Pendidikan Formal**

Sekolah Dasar : SD Swasta Al-Washliyah 10 Medan  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Gajah Mada Medan  
Sekolah Menengah Atas : SMKP Buana Bahari Medan  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
(UMSU)

Medan, Maret 2023



**Muhammad Syahputra Rizki**